

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL
GUNA Mendukung PEMBANGUNAN NASIONAL**

Oleh :

KOSASIH, S.E.

KOLONEL INF NRP 11930080990471

**KERTAS KARYA ILMIAH PERORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGGKATAN LXII
LEMHANNAS RI
TAHUN 2021**

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

KATA PENGANTAR

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, petunjuk dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII tahun 2021 telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) dengan judul: **“IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL GUNA Mendukung PEMBANGUNAN NASIONAL”**

Penentuan Tutor dan Judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 22 tahun 2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tutor Pembimbing Taskap kepada para peserta PPRA LXII dan Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 63 Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Penetapan Judul Taskap peserta PPRA LXII tahun 2021 Lemhannas RI.

Dalam kesempatan yang baik ini perkenankan Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXII di Lemhannas RI tahun 2021. Ucapan yang sama juga Penulis sampaikan kepada Tutor Taskap kami, Bapak Marsda TNI (Pur) Yoyok Yekti Setiyono dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing dalam pembuatan Taskap ini sampai selesai sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dihadapkan dengan latar belakang Penulis dalam penguasaan akademis dan terbatasnya waktu penulisan, maka kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan dari semua pihak, guna penyempurnaan penulisan naskah ini.

Besar harapan Penulis semoga Taskap ini dapat dimanfaatkan sebagai

sumbangan pemikiran Penulis kepada Lemhannas RI, DPR RI, Pemerintah Republik Indonesia khususnya Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan, dan Mabes TNI serta siapa saja yang barangkali membutuhkannya dalam rangka membahas implementasi nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka mendukung keberlanjutan pembangunan nasional.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita, dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama.

Sekian dan terima kasih, Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Juli 2021
Penulis



Kosasih, S.E.
Kolonel Inf NRP 11930080990471



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kosasih, S.E

Pangkat/NRP : Kolonel Inf/11930080990471

Jabatan : Dosen Utama

Instansi : Seskoad

Alamat : Jln Abdul Rahman Shaleh II No.11 RT 007 RW 01, Kwini,
Senen Jakarta Pusat.

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXII Tahun 2021 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
 - b. Apabila ternyata sebagian Tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia untuk dibatalkan.
2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat utuk dapat digunakan seperlunya.



Jakarta, Juli 2021

Penulis,

Kosasih, S.E.

Kolonel Inf NRP 11930080990471

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan dibawah ini Tutor Taskap dari :

Nama : Kosasih, S.E
Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII
Lemhannas RI Tahun 2021
Judul Taskap : **IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL GUNA
MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL**

Taskap tersebut diatas telah ditulis "~~sesuai/tidak sesuai~~" dengan Juknis Taskap Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 04 Tahun 2021, karena itu "~~layak/tidak layak~~" dan "~~disetujui/tidak disetujui~~" untuk diuji.

"coret yang tidak diperlukan"



Jakarta, ²⁶Juli 2021
Tutor Taskap

Yoyok Yekti Setiyono
Marsda TNI (Pur)

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah.....	6
3. Maksud dan Tujuan.....	6
4. Ruang lingkup dan Sistematika	7
5. Metode dan Pendekatan	8
6. Pengertian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
7. Umum	10
8. Peraturan Perundang-Undangan Terkait	10
9. Kerangka Teoritis	13
10. Data dan Fakta	17
11. Faktor-Faktor Lingkungan Strategis yang Berpengaruh.	20
BAB III PEMBAHASAN	
12. Umum	27
13. Memahami dan Menanamkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Kepada Generasi Muda	28
14. Implementasikan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Kehidupan Sehari-hari	37
15. Implementasikan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Mengantisipasi dan Menghadapi Bencana	

Guna Mendukung Pembangunan Nasional 45

BAB IV PENUTUP

16. Simpulan 53
17. Rekomendasi 54

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN :

1. ALUR PIKIR.
2. DAFTAR TABEL
3. DAFTAR GAMBAR
4. RIWAYAT HIDUP



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR TABEL

- TABEL 1. SEBARAN GEMPA BUMI DI INDONESIA SEPANJANG TAHUN 2019.
- TABEL 2. FREKUENSI DAN DAMPAK BENCANA DI INDONESIA TAHUN 2019.



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. FREKUENSI GEMPA DI INDONESIA DALAM 10 TAHUN TERAKHIR

GAMBAR 2. RANGKAIAN BENCANA AWAL TAHUN 2021



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Bangsa Indonesia secara resmi memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Momentum bersejarah ini digunakan sebagai titik balik bagi seluruh komponen bangsa untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang lama terjerebab kedalam kemiskinan, akibat eksploitasi asing terhadap sumber kekayaan alam Indonesia. Melalui lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif yang didukung oleh seluruh komponen bangsa lainnya, Indonesia secara perlahan bangkit dari keterperukan dengan program-program peningkatan kemakmuran rakyat melalui pembangunan nasional di segala bidang. Proses pembangunan tersebut tentunya berdasarkan pada cita-cita dan tujuan nasional Indonesia seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke-empat yaitu: Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pembangunan nasional selalu menjadi agenda dalam setiap program pemerintahan Indonesia. Pada zaman Orde Baru, landasan pembangunan nasional ditetapkan dalam GBHN. Di zaman Orde Baru, program pembangunan dibungkus dalam REPELITA I-VII. Sedangkan pada era pemerintahan Jokowi sekarang ini, pembangunan nasional tercantum dalam RPJMN. Keseluruhan program tersebut hanya berbeda nama tetapi mempunyai tujuan yang sama sebagaimana yang tersirat di Pembukaan UUD NRI 1945.

Pembangunan nasional adalah serangkaian kegiatan masyarakat, bangsa dan negara untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945. Pembangunan nasional dilaksanakan secara terencana, tertata dan terperinci untuk meningkatkan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang lebih maju

sebagaimana layaknya negara lain yang sudah sejahtera¹. Pembangunan nasional dimulai dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, serta dilaksanakan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Pembangunan nasional memerlukan keselarasan antara masyarakat dan pemerintah, yang didukung dengan kearifan lokal sebagai ciri khas bangsa Indonesia.

Cita-cita pembangunan yang menyertakan kearifan lokal tentu saja bukan tanpa kendala, arus globalisasi dan modernisasi terus menggempurnya. Kearifan lokal bagai barang langka, kemudian dicari kemana-mana, dan tinggal serpihan-serpihannya saja yang bisa ditemukan. Itupun sudah tercemari baik dari dalam maupun luar. Dari dalam, kearifan lokal seringkali disinonimkan dengan kekolotan, tidak rasional, dan primitif. Para pengikutnya kemudian menjadi segan mengusungnya. Dari luar, modernisasi selalu tampil lebih kuat, meyakinkan, dan menjanjikan keuntungan lebih besar melalui pembangunan yang selalu menjadi kendaraan untuk meraihnya.

Degradasi kearifan lokal yang terjadi di masyarakat Indonesia saat ini telah mencapai taraf mengkhawatirkan. Dampak yang ditimbulkan bukan hanya pada perilaku negatif para generasi muda bangsa yang seharusnya menjadi pilar utama pembangunan namun juga menyentuh pada rusaknya alam Indonesia akibat tindakan sekelompok manusia yang menggunakan pembangunan sebagai tamengnya. Rangkaian peristiwa permasalahan tersebut tergambar secara jelas di berbagai saluran televisi nasional, media sosial dan cetak dimana perilaku generasi telah melampaui batas kewajaran dengan adanya seorang anak yang tega membunuh orang tua kandungnya, melakukan tindakan kriminal, pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba.

Disisi lain, bencana alam yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia berupa tanah longsor, banjir bandang, kebakaran hutan lebih didominasi sebagai akibat ulah tangan jahil manusia dibandingkan pada faktor alamnya. Hal ini sebagai akibat dari segelintir orang yang lebih

¹ <https://lulusujian.com/pembangunan-nasional-masa-orde-lama-orde-baru-dan-era-reformasi>.

mementingkan egonya sendiri untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kearifan lokal di daerah. Semua tergambar dalam lirik lagu Ibu Pertiwi, yang sedang bersusah hati, emas dan intannya hanya kenangan yang membuat ibu pertiwi lara, merintih dan berdoa.

Potongan lirik lagu ini mengingatkan kita bahwa tanah air ini bukan hanya milik kita seorang tapi merupakan titipan anak cucu kita kelak sehingga dengan cara apakah kita merawat dan menjaga warisan ini, sedangkan hampir semua kegiatan yang kita lakukan berdampak pada kerusakan lingkungan. Hal ini tentu sangat membahayakan tanah air atau “Ibu Pertiwi” sebagai tempat tinggal kita dan makhluk hidup lainnya.

Merawat ibu pertiwi bukan permasalahan tugas siapa, kapan, bagaimana dan di mana, tapi ini semua merupakan tugas kita semua selaku makhluk Tuhan yang mendiami bumi ini. Tentu dalam merawat ibu pertiwi ini harus dilakukan dengan senang hati dan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab bahwa apa yang dilakukan adalah untuk kepentingan makhluk hidup lainnya. Kata “Ibu Pertiwi” merujuk pada personifikasi nasional negara Indonesia. Ibu Pertiwi sudah dikenal sejak zaman Hindu-Buddha di Nusantara sebagai dewi bumi dan lingkungan hidup, atau Dewi Prthvi dalam bahasa Sansakerta saat itu.² Sejalan dengan perkembangan zaman, Ibu Pertiwi menjadi kata kiasan yang sering diucapkan untuk menyebut tanah air dan bangsa Indonesia.

Indonesia yang terletak di kawasan Cincin Api Pasific (*Pacific Ring of Fire*) tentu mempunyai potensi yang sangat besar terjadinya bencana alam. Masalahnya karena Indonesia berada di antara rangkaian gunung berapi dan titik pertemuan lempeng bumi yang rawan terhadap bencana alam. Pada tahun 2018 banyak bencana alam yang menerpa ibu pertiwi ini. Salah satu yang terbilang membekas di ingatan kita yaitu tsunami di Palu dan Donggala yang terjadi sekitar bulan Oktober 2018. Disusul tsunami Selat Sunda yang terjadi di wilayah Banten, khususnya Anyer, Tanjung Lesung, Carita dan sekitarnya pada bulan Desember di tahun yang sama.

Di tengah bencana Pandemi Covid-19, di awal tahun 2021 ini, kita juga

² <https://historia.id/politik/articles/arti-ibu-pertiwi-hingga-pekik-merdeka-P3N8o/page/1>. Tim Historia. 15 Juli 2020.

telah digemparkan oleh bencana gempa bumi di daerah Majene, Sulawesi Barat. Belum lagi bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia lainnya (lihat gambar 2). Bencana-bencana tersebut, selain disebabkan oleh faktor alam, juga tidak terlepas dari ulah tangan-tangan jahil manusia sehingga menambah parah kondisi yang ada. Berbagai bencana yang melanda Ibu Pertiwi tentu saja telah menghambat program pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah segala upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional.

Dari berbagai peristiwa bencana yang terjadi di bumi pertiwi, menunjukkan bahwa bencana yang diakibatkan oleh ulah tangan jahil manusia lebih mendominasi daripada bencana yang diakibatkan oleh faktor alam sendiri, seperti tanah longsor, kebakaran hutan bencana banjir dan pemanasan global. Ini menandakan bahwa kadar kesadaran dan tanggung jawab kita untuk merawat ibu pertiwi masih rendah, dan pemahaman nilai-nilai kearifan lokal sudah semakin luntur.

Seperti yang kita ketahui, sebagai sebuah negara, bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai luhur yang khas dan menjadi nilai-nilai kearifan lokal dan menjadi sebuah tradisi dalam masyarakat. Sebagai tradisi, nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki secara turun temurun dalam kelompok masyarakat suatu bangsa adalah warisan budaya yang dapat diartikan sebagai sebuah identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa.

Nilai-nilai kearifan lokal mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting dan mendasar serta dijadikan sebagai landasan utama dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena suatu bangsa akan menjadi besar jika nilai-nilai kearifan lokal telah mengakar dalam sendi kehidupan masyarakatnya. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan dan keragaman nilai-nilai kearifan lokal yang merupakan daya tarik tersendiri di mata dunia. Nilai-nilai tersebut pada akhirnya dijadikan rujukan untuk membentuk ideologi negara, yaitu Pancasila yang secara umum dibangun atas nilai-nilai luhur yang telah mengakar di masyarakat jauh

sebelum Indonesia menjadi negara kesatuan.

Pesatnya kontak sosial/budaya antar provinsi dan antar negara yang terjadi saat ini disebabkan karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), yang ditandai dengan kian mutakhirnya media Informasi dan Teknologi Komunikasi (ITE). Akselerasi informasi arus globalisasi telah menyebabkan dunia seakan-akan telah menyatu menjadi satu kampung global dan tersatukannya budaya global yang berasaskan pada nilai-nilai liberalis. Dalam keadaan seperti ini, tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyeragaman budaya dan neoliberalisasi yang merasuk ke dalam seluruh sendi kehidupan, yang pada akhirnya akan menggerus nilai-nilai kearifan lokal bangsa.

Disisi lain, nilai-nilai kearifan lokal juga dapat mempengaruhi pembangunan nasional, baik berdampak positif maupun negatif. Nilai-nilai positif yang dapat kita ambil dari nilai-nilai kearifan lokal untuk mendukung pembangunan nasional antara lain budaya gotong royong, saling menghormati dan tepa selira. Peranan lain dari nilai-nilai kearifan lokal dalam mendukung pembangunan nasional adalah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menghindari eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam secara berlebihan melampaui kemampuan daya dukungnya.

Namun ada juga sisi negatif (menurut kaca mata luar) dari kearifan lokal terhadap pembangunan nasional, yang dianggap kolot dan tidak mau berkembang ke arah yang lebih modern. Sebagai contoh, di daerah Banten terdapat Suku Baduy yang terbagi menjadi dua golongan yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar. Baduy Dalam pada kehidupan kesehariannya masih memegang teguh adat dan menjalankan aturan adat dengan baik, mereka tidak terkontaminasi dengan budaya luar. Penggunaan barang elektronik tidak diperkenankan oleh Ketua Adat yang disebut Jaro untuk menopang aktivitasnya sehari-hari. Tentu saja ini akan menghambat proses pembangunan nasional dilihat dari sudut pandang kita. Namun demikian, Baduy Dalam pun masih membawa dampak positif bagi pembangunan nasional, khususnya sektor pariwisata nasional. Sementara itu, Baduy Luar sudah lebih terbuka dan menerima perubahan akibat pengaruh modernisasi.

Dalam konteks perubahan nilai-nilai kearifan lokal juga telah terjadi pergeseran orientasi nilai yang dipengaruhi oleh arus globalisasi. Masyarakat cenderung makin pragmatis, hedonis dan individualis serta makin berorientasi pada materi serta terperangkap dalam gaya hidup konsumtif yang ditawarkan oleh kekuatan global kapitalisme. Dalam realita Indonesia saat ini, secara ekstrem dapat dikatakan bahwa nilai-nilai kearifan lokal yang kita miliki mirip benda langka yang kita warisi dari leluhur, tetapi kita tidak dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata sehari-hari, sehingga tidak mampu merespon tantangan zaman yang telah berubah. Dengan mengacu kepada latar belakang tersebut di atas maka diperlukan suatu gagasan tentang bagaimana merawat dan menjaga ibu pertiwi melalui implementasi nilai-nilai kearifan lokal guna mendukung pembangunan nasional.

2. **Rumusan Masalah.**

Berdasarkan uraian latar belakang dan kondisi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa persoalan antara lain: generasi muda belum memahami secara mendalam tentang nilai-nilai kearifan lokal; nilai-nilai kearifan lokal belum sepenuhnya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari; dan nilai-nilai kearifan lokal belum diimplementasikan untuk mencegah terjadinya bencana. Disamping itu, Era Globalisasi dan perkembangan IT telah menggerus dan mengikis nilai-nilai luhur kearifan lokal pada generasi muda bangsa. Dari uraian di atas dapat diambil rumusan masalahnya yaitu: **“Bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai kearifan lokal guna mendukung pembangunan nasional?”**

Merujuk pada berbagai implikasi di atas, maka terdapat sejumlah pertanyaan kajian yang harus ditelaah lebih lanjut, yaitu:

- a. Bagaimana memahami dan menanamkan nilai-nilai kearifan lokal kepada generasi muda?
- b. Bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari?

- c. Bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam mengantisipasi dan menghadapi bencana guna mendukung pembangunan nasional?

3. Maksud dan Tujuan.

- a. **Maksud.** Pembahasan materi Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pentingnya menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai kearifan lokal, berikut analisis persoalan yang dihasilkan untuk dapat mendukung pembangunan nasional
- b. **Tujuan.** Penulisan Kertas Karya Ilmiah Perorangan ini adalah untuk menyampaikan sumbangan pemikiran kepada pemangku kepentingan tentang pentingnya implementasi nilai-nilai kearifan lokal guna mendukung pembangunan nasional.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

- a. **Ruang Lingkup.** Dalam penulisan kertas karya perseorangan ini dibatasi pada nilai-nilai kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat serta pengaruhnya terhadap mitigasi dan penanganan bencana guna mendukung pembangunan nasional.
- b. **Sistematika.** Taskap ini terdiri dari 4 (empat) Bab yang saling terkait antara Bab yang satu dengan Bab lainnya, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- 1) **Bab I Pendahuluan.** Pada Bab ini akan membahas situasi umum yang terkait dengan Negara Indonesia yang terurai dalam latar belakang penulisan, perumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan yang digunakan, serta beberapa pengertian untuk dapat menyamakan persepsi dalam memahami pembahasan.
- 2) **Bab II Tinjauan Pustaka.** Pada Bab ini akan dijelaskan tentang dasar-dasar pemikiran dalam penulisan Taskap ini.

Dibahas pula mengenai pemetaan data dan fakta serta kerangka teoritis yang bersumber dari kajian pustaka maupun referensi ilmiah yang terkait dengan materi bahasan. Selanjutnya akan diuraikan pengaruh perkembangan lingkungan strategis berdasarkan faktor eksternal maupun internal yang berada pada tataran global, regional dan nasional.

- 3) **Bab III Pembahasan.** Pada Bab ini akan dianalisis secara detail setiap pokok-pokok bahasan terkait pentingnya penanaman dan implementasi nilai-nilai kearifan lokal dalam mitigasi dan mengatasi bencana untuk mendukung pembangunan nasional. Pembahasan yang dilakukan tersebut harus merujuk dari teori dan tinjauan pustaka sebagaimana uraian di bab sebelumnya. Hasil analisis ini nantinya akan dapat dirumuskan untuk pemecahan pokok-pokok bahasan, yang menggambarkan solusi secara logis, kongkrit dan kontekstual.
- 4) **Bab IV Penutup.** Pada Bab ini berisi simpulan dari uraian penulisan dan beberapa rekomendasi yang diajukan untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan.

5. **Metode dan Pendekatan.**

- a. **Metode.** Dalam penulisan Taskap ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini bertujuan untuk membangun teori berdasarkan fakta empiris di lapangan dalam konteks sosial, sehingga dapat mengungkapkan makna yang sesungguhnya sesuai apa yang terjadi dan dirasakan.
- b. **Pendekatan.** Untuk menganalisis data dalam Taskap ini menggunakan pendekatan kepentingan nasional ditinjau dari aspek kesejahteraan dan keamanan dengan analisis multi disiplin ilmu sesuai kerangka teoritis yang ada.

6. Pengertian.

Agar dapat lebih menyatukan persepsi pada pembahasan selanjutnya, maka dalam Taskap ini menggunakan beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. **Pembangunan Nasional.** Merupakan upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan Tujuan Nasional.³
- b. **Budaya.** Adalah sistem dari pola-pola tingkah laku individual yang diturunkan secara sosial di dalam kehidupan masyarakat, dan berkerja menghubungkan komunitas manusia dengan lingkungan ekologi mereka.⁴ Dalam cara hidup ini termasuk teknologi dan bentuk organisasi ekonomi, pola-pola menetap, bentuk pengelompokan sosial dan pengelompokan politik, kepercayaan dan praktek keagamaan serta pengelompokan lainnya.
- c. **Kearifan Lokal.** Menurut Ulfah Fajarini, kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka.⁵
- d. **Pembangunan Karakter Bangsa.** Merupakan upaya kolektif dan sistemik suatu negara untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan ideologi, konstitusi, haluan negara, serta potensi kolektifnya dalam konteks kehidupan nasional, regional, dan global yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD NRI 1945.⁶

³ <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/makna-hakikat-tujuan-pembangunan-nasional-49>

⁴ Koentjaraningrat. 1997. Koentjaraningrat dan Antropologi di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm 5.

⁵ Ulfah Fajarini. 2014. Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter". Sosio Didaktika: Vol. 1, No. 2 Des 2014

⁶ Pemerintah RI. 2010. Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum.

Pembangunan nasional sebagai salah satu kendaraan untuk mencapai kemakmuran bangsa Indonesia tentunya menjadi prioritas dalam setiap program kerja pemerintah. Berbagai bentuk peraturan telah dicanangkan oleh pemerintah untuk mengawal pembangunan nasional agar dapat mencapai tujuan bangsa sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat. Namun terkadang ketika berbicara masalah keuntungan, aturan yang sudah ada terkadang diabaikan oleh pelaksana di lapangan bahkan seolah-olah itu adalah sebuah angin lalu. Di sisi lain proses pembangunan juga ada yang menabrak nilai-nilai kearifan lokal daerah yang berdampak negatif baik bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar.

Idealnya pembangunan harus tetap menghormati dan menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan yang tidak didasari dengan kearifan lokal setempat hanya meninggalkan luka bagi masyarakat, rusaknya lingkungan sampai dengan timbulnya bencana alam. Betapa ironisnya ketika kesejahteraan masyarakat yang diharapkan berubah menjadi bencana yang justru menyengsarakan bangsa Indonesia sebagai akibat ulah manusia yang memaknai lain arti dari pembangunan tersebut.

Mengaca dari fenomena di atas, maka dalam Bab ini penulis perlu untuk membahas peraturan perundang-undangan, kerangka teoritis serta data dan fakta terkait Implementasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Guna Mendukung Pembangunan Nasional. Semua elemen tersebut digunakan sebagai landasan menganalisa segala fenomena yang ada dan hubungan antar faktor yang mempengaruhi sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru dalam aplikasi di lapangan.

8. Peraturan Perundang-Undangan Terkait.

- a. **Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.** Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Kesatuan Republik Indonesia memuat aturan-aturan pokok yang diperlukan bagi penyelenggaraan negara khususnya untuk menjamin eksistensi bangsa dan negara Indonesia dengan segala kepentingannya. Dalam Pembukaan UUD NRI 1945 secara jelas telah mencantumkan cita-cita dan tujuan nasional sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia.

Pengakuan terhadap kearifan lokal merupakan kehendak dari konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Kearifan lokal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesatuan Masyarakat Hukum Adat, sehingga selama masih relevan dan tak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu pemerintah wajib mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal dalam pembentukan regulasi di daerah. PP dan Peraturan Daerah serta peraturan di bawahnya menjadi salah satu dasar hukum untuk menunjukkan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat itu masih eksis.

- b. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.** Secara hukum formal kearifan lokal telah dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yang menyatakan bahwa kearifan lokal merupakan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan

masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.⁷

Dalam undang-undang tersebut juga diperkenalkan asas kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia, yaitu bahwa dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memerhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Disamping itu, salah satu pertimbangan pada UU No 32 Tahun 2009 ini adalah bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.⁸

- c. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.** Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan guna menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan baik di pusat maupun di daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat.

Pada Pasal 3 ayat 1 dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.⁹ Yang dimaksud dengan “bidang kehidupan” antara lain

⁷ <https://studylibid.com/doc/618780/pembangunan-hukum-berbasis-kearifan-lokal>

⁸ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-32-2009-perlindungan-pengelolaan-lingkungan-hidup>

⁹ UU RI NO 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

agama, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan, dan keamanan.¹⁰

- d. **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.** Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan berada di garis khatulistiwa serta terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan kekayaan alam yang begitu melimpah. Namun di sisi lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi (lihat gambar 1), sehingga memerlukan penanganan yang serius, terpadu, sistematis, dan terkoordinasi.

Potensi terjadinya bencana di wilayah Indonesia dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis kategori bencana, yaitu bencana alam dan bencana non alam. Kedua jenis bencana tersebut tentu harus kita antisipasi dan tangani secara serius agar tidak menimbulkan korban lebih banyak lagi. Undang-Undang No 24 tahun 2007 ini mengatur tentang bagaimana penanganan terhadap bencana. Penulis memasukkan undang-undang ini sebagai landasan berfikir terutama dalam proses mitigasi bencana.

9. Kerangka Teoritis.

- a. **Teori Implementasi.** Menurut Oktasari (2015:1340), Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan.¹¹ Implementasi merupakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang melahirkan dampak atau akibat terhadap sesuatu yang harus dilakukan. Sesuatu tersebut bisa berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45): *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* (proses

¹⁰ Penjelasan atas UU RI NO 25 Tahun 2004

¹¹ http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1657/5/141801061_file%205.pdf

mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: “*Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy*” (tindakan yang dilakukan pemerintah).¹² Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan dikeluarkan.

Teori Implementasi dipergunakan dalam taskap ini untuk menggambarkan bahwa pembangunan nasional yang saat ini berlangsung belum memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal sehingga diperlukan langkah implementasi melalui teori implementasi sehingga menghasilkan sebuah rekomendasi dan hasil kajian yang valid, sah dan sistematis.

- b. **Teori Budaya.** Budaya adalah sistem dari pola-pola tingkah laku individual yang diturunkan secara sosial di dalam kehidupan masyarakat, dan berkerja menghubungkan komunitas manusia dengan lingkungan ekologi mereka.¹³ Dalam cara hidup ini termasuk teknologi dan bentuk organisasi ekonomi, pola-pola menetap, bentuk pengelompokan sosial dan pengelompokan politik, kepercayaan dan praktek keagamaan serta pengelompokan lainnya.

Konsep budaya dalam masyarakat sesungguhnya turun jadi pola tingkah laku yang terikat kepada kelompok-kelompok tertentu yaitu menjadi adat istiadat atau cara kehidupan (*way of life*) manusia. Dari sudut pandang teori budaya, perkembangan penting telah muncul dari pendekatan evolusioner terhadap budaya sebagai sistem adaptif. Artinya transformasi sosial dalam masyarakat juga melibatkan komponen turunan yakni konsep penyesuaian dan adaptasi.

Menurut Sir Edwards B Tylor, kebudayaan adalah keseluruhan kompleks dari ide dan segala sesuatu yang dihasilkan manusia berdasarkan kesamaan pengalaman historis.¹⁴ Menurut William H.

¹² Ibid. Hlm: 9

¹³ Koentjaraningrat. 1997. Koentjaraningrat dan Antropologi di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm 5.

¹⁴ Sriyana S.Sos.,M.Si. 2020. Perubahan Sosial Budaya. Sumedang: Literasi Nusantara.

Haviland, kebudayaan merupakan seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh para anggota masyarakat, yang jika dilaksanakan oleh para anggotanya akan melahirkan perilaku yang dipandang layak dan dapat diterima oleh semua masyarakat.¹⁵

Teori Budaya dipergunakan dalam taskap ini untuk menjelaskan bahwa kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat bersumber dari budaya yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Batasan-batasan inilah yang seharusnya menjadi *guidance* dalam proses pembangunan nasional sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan.

- c. **Teori Manajemen.** Manajemen berasal dari Bahasa Inggris, “*management*” yang dikembangkan dari kata “*to manage*” yang artinya mengatur atau mengelola.¹⁶ Menurut G.R. Terry, fungsi-fungsi manajemen adalah *Planning, Organizing, Actuating, Controlling*. *Planning* atau perencanaan merupakan tindakan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan.¹⁷ Para manajer menetapkan tujuan-tujuan dan menyusun program-program untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai. Para manajer juga perlu merancang dan mengembangkan suatu organisasi yang mampu melaksanakan berbagai program secara sukses.

Setelah rencana ditetapkan dan rencana kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan itu dibagikan, maka tindakan selanjutnya dari manajer adalah menggerakkan organisasi untuk segera melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, sehingga apa yang menjadi tujuan benar-benar tercapai. Kegiatan terakhir adalah pengawasan. Menurut G.R. Terry, pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai, apa yang sedang dilaksanakan,

¹⁵ Ibid. Hlm: 24

¹⁶ Samsudin Sadili. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Pustaka Setia. Hlm 15.

¹⁷ George R. Terry. 2009. Prinsip-prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara..

menilai pelaksanaan, dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana atau selaras dengan standar.

Teori Manajemen dipergunakan dalam taskap ini untuk menggambarkan bahwa proses implementasi nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan nasional harus di *manage* dengan baik mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengawasan sehingga dapat mencapai tujuan yang telah digariskan.

d. **Teori Organisasi.** Menurut Robbins, struktur organisasi adalah tata cara pembagian tugas pekerjaan yang kemudian dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal.¹⁸ Robbins juga mengemukakan ada 6 unsur yang perlu diperhatikan dalam membentuk suatu struktur organisasi, yaitu :

- 1) Spesialisasi atau pembagian tugas sesuai keahliannya. Adalah penyelesaian suatu pekerjaan menjadi sejumlah langkah penyelesaian dengan keahlian atau kualifikasi tertentu.
- 2) Departementasi. Pembagian tugas pekerjaan berdasarkan pada kesamaan kelompok pekerjaan maupun berdasarkan teritori agar tugas pekerjaan dapat dikoordinasikan.
- 3) Rantai Komando, adalah alur perintah dan kewenangan yang berhubungan dengan tanggung jawab dari jenjang atau tingkatan dalam suatu organisasi.
- 4) Rentang Kendali. Menentukan banyaknya jumlah bawahan atau pegawai yang dapat dikendalikan oleh seorang manajer secara efektif dalam suatu organisasi.
- 5) Sentralisasi dan Desentralisasi. Adalah cara pengambilan suatu keputusan berdasarkan pada kewenangan manajerial.
- 6) Formalisasi. Adalah tingkatan pekerjaan dalam sebuah organisasi yang dibakukan berdasarkan pada aturan.

¹⁸ Stephen P. Robbins. 2003. Perilaku Organisasi. Jakarta: Index.

Teori Organisasi dipergunakan dalam taskap ini untuk menunjukkan bahwa pembangunan nasional yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal perlu diawasi oleh lembaga/organisasi baik formal maupun informal sebagai fungsi kontrol di lapangan.

10. **Data dan Fakta.**

Pembangunan nasional Indonesia adalah pembangunan yang dibangun berdasarkan atas pengamalan Pancasila yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya. Perlu disadari bahwa pembangunan ekonomi bukan hanya semata-mata proses ekonomi belaka, tetapi juga merupakan suatu penjelmaan dari proses perubahan sosial, politik, dan budaya dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara adil dan merata.¹⁹ Saat ini pemerintah melalui sitem otonomi daerah telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk turut terlibat secara aktif dalam membangun wilayahnya masing-masing dengan harapan percepatan untuk mencapai kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

Disamping itu, dengan keberadaan Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dengan berbagai ragam budaya tentunya sangat tepat apabila pemerintah daerah terlibat secara langsung dalam proses pembangunan nasional. Harapannya nilai-nilai kearifan lokal di setiap daerah harus tetap dipertahankan ditengah pembangunan yang semakin masif. Namun kenyataan di lapangan sungguh sangat jauh berbeda, kebijakan ini justru dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan pribadi tanpa melihat nilai-nilai kearifan lokal yang berdampak negatif bagi masyarakat. Alih-alih kesejahteraan meningkat, malah justru kesengsaraan yang didapatkan.

Beberapa contoh kasus yang terjadi di Indonesia dapat dijelaskan lebih lanjut. Berdasarkan laporan terbaru dari Greenpeace Asia Tenggara, "Karhutla Dalam Lima Tahun Terakhir" mengungkapkan kegagalan total dari pemerintah Indonesia dalam melindungi hutan dan lahan gambut dari

¹⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_nasional_Indonesia

pembakaran.²⁰ Telah terungkap sekitar 4,4 juta hektar lahan atau setara 8 kali luas pulau Bali, telah terbakar antara kurun waktu tahun 2015 s.d 2019. Laporan tersebut telah menyoroti beberapa perusahaan perkebunan paling merusak yang beroperasi di beberapa wilayah Indonesia. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan demi kepentingan ekonomi telah mengancam aturan perlindungan lingkungan dan memperburuk resiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).²¹ Dampaknya setelah beberapa kali kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Indonesia, telah menimbulkan puluhan korban jiwa. Laporan-laporan pemantauan menyatakan bahwa kebakaran-kebakaran tersebut telah menciptakan kemungkinan kualitas udara terburuk yang pernah dicatat dunia. Sedangkan peneliti lain memperkirakan jutaan orang telah terpapar berbagai tingkat polusi udara, mulai dari yang tidak sehat hingga berbahaya. Selain menyebabkan masalah kesehatan yang serius, kini semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa polusi udara dapat meningkatkan risiko terjangkit Covid-19 dan memperburuk keparahan infeksi penyakit ini bagi mereka yang sudah positif terjangkit Covid-19.²²

Bencana alam selama ini selalu dipandang sebagai *force majeure*, yaitu suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan atau kontrol manusia dan tidak dapat dihindarkan. Padahal kenyataannya sebagian besar bencana yang timbul diakibatkan oleh ulah dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Seharusnya dengan kondisi geografis Indonesia saat ini, para pelaku pembangunan nasional memahami pentingnya kepedulian terhadap lingkungan yang sebenarnya secara tersirat telah digambarkan pada nilai-nilai kearifan lokal di daerah. Mirisnya, hal ini hanya dijadikan sebagai sesuatu yang kolot, tidak modern dan dianggap menghambat tumbuhnya pembangunan di Indonesia. Alhasil rangkaian bencana terus terjadi silih berganti di wilayah Indonesia yang tentunya dapat menjadi salah satu faktor penghambat dari proses pembangunan nasional. Dalam laporan BNPB disebutkan bahwa sepanjang tahun 2019 telah terjadi 3.758 bencana

²⁰<https://www.greenpeace.org/indonesia/publikasi/44219/karhutla-dalam-lima-tahun-terakhir/>.
Diakses pada 22 Okt 2020.

²¹ Ibid.

²² <https://www.greenpeace.org/indonesia/publikasi/5605/>

diantaranya 1.363 kali puting beliung, 746 kali kebakaran hutan dan lahan, 764 banjir, 708 kali tanah longsor, 123 kali kekeringan, 29 kali gempa bumi, 18 kali gelombang pasang dan abrasi, 7 kali erupsi gunung berapi.²³

Data di atas adalah sedikit gambaran dari serangkaian peristiwa bencana yang terjadi di negeri ini sebagai akibat ulah jahil tangan manusia yang menjadikan alasan pembangunan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Kondisi ini diperburuk dengan potret kehidupan dan tingkah laku generasi muda bangsa Indonesia yang semakin jauh dengan nilai-nilai budaya bangsa. Gempuran teknologi melalui media sosial menjadi sarana ekspansi budaya barat yang dengan mudahnya diterima para generasi muda bangsa. Kasus anak membunuh orang tuanya, pencurian dan narkoba dilakukan oleh anak muda serta perilaku seks bebas di kalangan pelajar hampir setiap hari menghiasi pemberitaan di media-media Indonesia baik cetak maupun elektronik. Apabila pemerintah dan segenap komponen bangsa yang ada tidak mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi segala permasalahan di atas maka dapat dipastikan pembangunan nasional tidak dapat berjalan sesuai dengan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Pembangunan nasional bukan hanya persoalan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat saja, tetapi juga berkaitan dengan peningkatan seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk nilai-nilai kearifan lokal di dalamnya. Untuk itu, memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai kearifan lokal merupakan sesuatu yang penting bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Melestarikan, mendayagunakan dan mengimplementasikan nilai-nilai kearifan lokal dapat menjadi hal yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tingkat nasional, tantangan untuk menggabungkan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam pembangunan nasional berada pada aspek koordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat dalam isu-isu terkait nilai-nilai kearifan lokal.

²³ BNPB.2019. Data Bencana Sepanjang 2019.

11. **Faktor-Faktor Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh.**

Dinamika perkembangan lingkungan strategis akan selalu membawa pengaruh terhadap kebijakan pembangunan nasional, baik pengaruh positif maupun negatif, baik langsung maupun tidak langsung. Implikasi yang positif tentu saja akan membawa manfaat dalam mendukung meraih cita-cita, tujuan nasional dan kepentingan nasional. Sedangkan implikasi yang negatif akan menyebabkan meningkatnya potensi ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Situasi politik internasional dewasa ini masih diwarnai oleh permasalahan lama yang belum berhasil diatasi, dan permasalahan semakin bertambah kompleks dengan munculnya serangkaian masalah baru. Dinamika perkembangan di bidang politik dan keamanan global semakin memanas karena dibawah pengaruh globalisasi dan implikasinya dalam hubungan internasional, sehingga negara-negara di dunia dituntut untuk saling bekerja sama. Namun di sisi lain persaingan antar negara dalam melindungi kepentingan nasionalnya juga semakin meningkat.

Hubungan saling ketergantungan antar negara semakin menguat, tetapi pada saat yang bersamaan kesenjangan kekuatan militer dan ekonomi semakin melebar. Ini disebabkan karena agenda dan isu internasional saat ini masih dominan dipengaruhi oleh kebijakan dan agenda dari negara-negara besar yang sudah maju. Akibatnya negara-negara berkembang yang memiliki sumber daya terbatas, harus lebih hati-hati dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Negara berkembang juga harus lebih aktif dalam memperkuat ketahanan nasionalnya di berbagai sendi kehidupan, dan harus lebih baik lagi dalam melakukan adaptasi yang diperlukan untuk melindungi kepentingan nasionalnya.

Mengaca dari gambaran tersebut di atas, maka segala bentuk perkembangan lingkungan strategis yang terjadi sangat berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan bangsa termasuk di dalamnya adalah pembangunan nasional dan nilai-nilai budaya bangsa. Pembangunan yang selalu direfleksikan dengan kemajuan negara-negara barat tanpa mengindahkan nilai-nilai kearifan lokal lambat laun akan menjadikan bom waktu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

- a. **Lingkungan Strategis Global.** Peningkatan dan perluasan pengaruh Tiongkok semakin tak terelakkan. Tiongkok telah menjadi pusat gravitasi baru di kawasan, sebuah kondisi yang harus diterima oleh Amerika Serikat. Selain mempunyai ambisi yang sangat besar, Tiongkok juga didukung oleh kekuatan ekonomi sehingga upaya strategi *rebalancing* yang dilakukan oleh Amerika Serikat semakin sulit. Bahkan secara terang-terangan Tiongkok berani merespon kebijakan perang dagang Amerika Serikat yang saat itu dipimpin oleh Presiden Donald Trump. Sebagai bentuk kebangkitan Tiongkok sebagai negara adidaya baru, Presiden Xi Jinping mendeklarasikan program BRI (*Belt and Road Initiative*). *Belt* merujuk pada rute darat untuk transportasi jalan dan kereta api, disebut *the Silk Road Economic Belt*, sedangkan *Road* mengacu pada rute laut, yang disebut *the 21st Century Maritime Silk Road* (The Guardian, 2019). Sejak itu, BRI telah menjadi prioritas bagi pemerintah Tiongkok.

Kehadiran *Belt and Road Initiative* (BRI) di Indonesia pada tahun 2017, telah menerapkan kebijakan "*Equal With Indonesia Dream*" ketika Presiden Tiongkok Xi Jinping bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo. Secara tidak langsung Presiden Xi Jinping menyatakan bahwa antara Tiongkok dan Indonesia memiliki keseimbangan kepentingan. Bagi Indonesia sendiri, BRI menjadi sebuah tantangan besar yang harus dihadapi karena Indonesia memiliki ketergantungan terhadap Tiongkok, baik itu dari aspek ekonomi, investasi, maupun infrastruktur yang menyebabkan Indonesia tidak dapat menjadi sebuah negara yang mandiri. Berdasarkan dokumen *Belt and Road Initiative yang berjudul "Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road,"* menyebutkan bahwa proyek besar BRI ini tidak hanya terfokus kepada infrastruktur saja. Tetapi ada juga program penguatan hubungan budaya dengan negara-negara yang terlibat di dalam proyek BRI. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya hubungan kerja sama di sektor pendidikan dan kebudayaan

dengan negara-negara BRI, melalui hubungan *people to people* (berkaitan dengan *cultural , education, dan workers*).²⁴

Saat ini dampak negatif dari BRI sangat dirasakan oleh bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya TKA (*migrant workers*) yang berasal dari Tiongkok di Indonesia. Dilansir dari CNBC Indonesia, telah menyatakan bahwa jumlah TKA terbanyak disumbang oleh Tiongkok pada tahun 2017, hingga mencapai 24.804 TKA, hal tersebut setara dengan hampir 3% dari total TKA di Indonesia pada tahun 2018. Maka dari itu dengan adanya data tersebut, dapat mengancam pekerja lokal Indonesia dikarenakan lapangan kerja yang ada telah diisi oleh TKA dari Tiongkok.²⁵ Selanjutnya program BRI ini akan berdampak pada tidak dihormatinya nilai-nilai kearifan lokal setempat mengingat adanya kucuran dana yang begitu besar disertai dengan perjanjian antara kedua negara yang menuntut pencapaian hasil terhadap infrastruktur yang menjadi obyek investasi. Keharusan inilah yang terkadang menjadi penyebab ditabraknya nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat.

Revolusi industri 4.0 dan Pandemi Covid-19 yang saat ini melanda seluruh kawasan di dunia juga memberikan pengaruh negatif di Indonesia. Generasi muda milenial semakin tidak tahu etika dan tingkah laku akibat penggunaan teknologi informasi yang salah. Disamping itu pandemi Covid-19 secara perlahan tapi pasti mulai merubah perilaku sosial di masyarakat. Kehidupan gotong royong, bersalam-salaman, kegiatan dan interaksi sosial mulai dibatasi sebagai bentuk pencegahan penularan Covid-19. Apabila kondisi ini tidak disikapi dengan bijak, maka generasi muda yang mengalami pandemi Covid 19 akan menanamkan dalam pribadi mereka bahwa kehidupan yang benar adalah seperti yang dia alami saat ini. Terlebih lagi didukung dengan kemajuan teknologi yang tidak terbendung akan menciptakan individu-individu yang autis dan masa bodoh.

²⁴ <https://kumparan.com/naniseptianie22/tantangan-indonesia-di-tengah-belt-and-road-initiative-bri-tiongkok-1unt5qMtwDZ>. Dipublikasikan pada tanggal 18 Desember 2020. Pkl: 12.53

²⁵ Ibid

- b. **Lingkungan Strategis Regional.** Isu pembantaian etnis muslim Rohingya yang berlangsung pada tahun 2017-2018 oleh militer Myanmar menjadi isu utama dalam beberapa tahun terakhir. Organisasi *Doctors Without Borders* memperkirakan sekurang-kurangnya ada 6700 warga Rohingya, termasuk 730 anak-anak tewas akibat kekerasan yang dilakukan oleh tentara Myanmar, dari bulan Agustus hingga September 2017. PBB menyebut, sekitar 200 pemukiman Rohingya juga dihancurkan dari 2017 hingga 2019.²⁶ Myanmar juga gagal dalam memenuhi kewajibannya untuk mencegah genosida, melakukan penyelidikan korban genosida dan memberlakukan undang-undang yang efektif untuk mengkriminalisasikan dan menghukum tindakan genosida.

Peristiwa serupa hampir terjadi di kawasan Asia Selatan yaitu India yang dipicu dengan disahkannya UU Kewarganegaraan pada tanggal 12 Desember 2019 di masa pemerintahan PM Narendra Modi. UU baru ini telah mempercepat proses pemberian kewarganegaraan untuk warga dari enam agama yaitu Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, dan Kristen yang berasal dari negara Bangladesh, Afghanistan dan Pakistan apabila mereka datang ke India sebelum tahun 2015. Dalam UU tersebut tidak mencantumkan agama Muslim. Tentu saja hal tersebut menuai reaksi dari dalam negeri India, bahkan hingga ke negara luar. Akibatnya bentrok antar umat Muslim dan Hindu pecah di India yang mengakibatkan 200 orang luka-luka dan 34 meninggal dunia. Kondisi ini juga menyebabkan ketidak stabilan interaksi sosial di seluruh wilayah Indonesia.²⁷

Berangkat dari dua peristiwa tersebut, Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya dan agama sangat rentan terimbas dampak negatif. Isu ini bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memunculkan titik-titik konflik di berbagai

²⁶<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200910132248-4-185828/pembantaian-rohingya-myanmar-bunuh-semua-anak-orang-dewasa>. Dipublikasikan pada tanggal 10 September 2020. Pkl: 14.27.

²⁷<https://www.merdeka.com/dunia/fakta-fakta-uu-kewarganegaraan-india-diskriminasi-terhadap-muslim.html>. Dipublikasikan pada tanggal 19 Desember 2019. Pkl:06.11.

wilayah Indonesia seperti beberapa tahun yang lalu pernah terjadi. Harapannya ketika konflik terjadi, batasan nilai-nilai kearifan lokal tidak akan berlaku yang berdampak pada terhambatnya pembangunan nasional.

- c. **Lingkungan Strategis Nasional.** Terkait eksistensi masyarakat dan kerifan lokal dikenal beberapa kearifan lokal nusantara seperti: Alam Takambang Jadi Guru (Minangkabau), Banjar Sari (Jakarta), Nyabuk Gunung (Sunda), Bersih Desa (Jawa), Hamemayu Hayuning Bawono (Yogyakarta), Karah (Surabaya), Tri Hita Karana (Bali), Awig Awig (Bali dan NTT), Kassi-Kassi (Makasar), dan Sasi (Maluku).²⁸ Nilai-nilai kearifan lokal tersebut dianggap terbukti sangat baik dari eksistensinya, dan nilai kearifan lokal masyarakat tersebut ternyata mampu menyeimbangkan kondisi alam dan ekosistem. Nilai-nilai kearifan lokal tersebut telah melekat dalam eksistensi dan kehidupan masyarakat setempat, sehingga layak dikatakan sebagai nilai kearifan asli bangsa Indonesia. Masyarakat adat hidup dengan nilai kearifan lokal mereka, maka dari itu jika negara serius melindungi masyarakat adat, maka harus pula melindungi dan menjaga eksistensi nilai-nilai kearifan lokal mereka.

Perkembangan lingkungan nasional dalam kaitannya dengan implementasi nilai-nilai kearifan lokal dapat dilihat dari beberapa aspek Asta Gatra antara lain:

- 1) Geografi. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Secara geografi, Indonesia berada pada posisi silang dua benua dan dua samudera. Luasnya wilayah Indonesia merupakan anugerah dari Tuhan YME, karena Indonesia terbentuk dari ribuan pulau dengan keanekaragaman suku dan budaya sehingga kaya akan nilai-nilai kearifan lokalnya.
- 2) Demografi. Jumlah penduduk yang besar bila didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi, akan menjadi modal berharga dalam pembangunan nasional. Namun sebaliknya

²⁸ Nyoman Wijana. 2016. Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yogyakarta: Plantaxia, hlm. 3.

jika kualitas SDM rendah, penyebaran penduduk tidak merata, tingkat pengangguran dan kemiskinan tinggi akan menjadi potensi konflik dan kendala dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional Bangsa Indonesia. Bahkan bisa memunculkan sikap intoleransi dan jauh dari sikap gotong royong. Sehingga perlu memantapkan nilai-nilai kearifan lokal daerah masing-masing agar tercipta saling menghargai dan menghormati sebagai satu keluarga bangsa Indonesia.

- 3) Ideologi. Saat ini pengaruh ideologi Transnasional cukup kuat, demikian pula pengaruh ideologi Islam Fundamental dari kawasan Timur Tengah yang berkarakter keras mempengaruhi pemikiran sebagaimana kecil masyarakat Indonesia untuk berfikir dan bertindak radikal. Kelemahan dalam pemahaman dan pengamalan terhadap ideologi Pancasila dapat dimanfaatkan oleh pihak lain sehingga mengancam kesatuan dan persatuan bangsa dan sekaligus mengambat upaya revitalisasi dan implementasi nilai-nilai kearifan lokal.
- 4) Politik. Setelah 23 tahun pasca reformasi, nampaknya masa transisi terutama di bidang politik belum tuntas. Demokrasi yang dimaknai sebagai kedewasaan belum sepenuhnya dipraktekkan dengan benar. Euforia kebebasan belum sima, politik pasca reformasi masih dimaknai sebagai perubahan belaka dan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Kehidupan politik saat ini diwarnai dengan sistem multi partai dan asas parpol juga terbuka (tidak harus menggunakan asas Pancasila). Politik tidak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional tetapi digunakan sebagai tujuan parpol dalam merebut kursi jabatan sehingga yang terjadi adalah politik transaksional. Selain itu dengan dibukanya keran demokrasi pasca reformasi telah menstimulus munculnya politik identitas. Politik merupakan cerminan dari proses demokrasi harus mampu menangkap nilai-nilai kearifan lokal dan pandangan-

pandangan moral seluruh masyarakat Indonesia, bahkan seluruh umat manusia sehingga tercipta politik demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia.

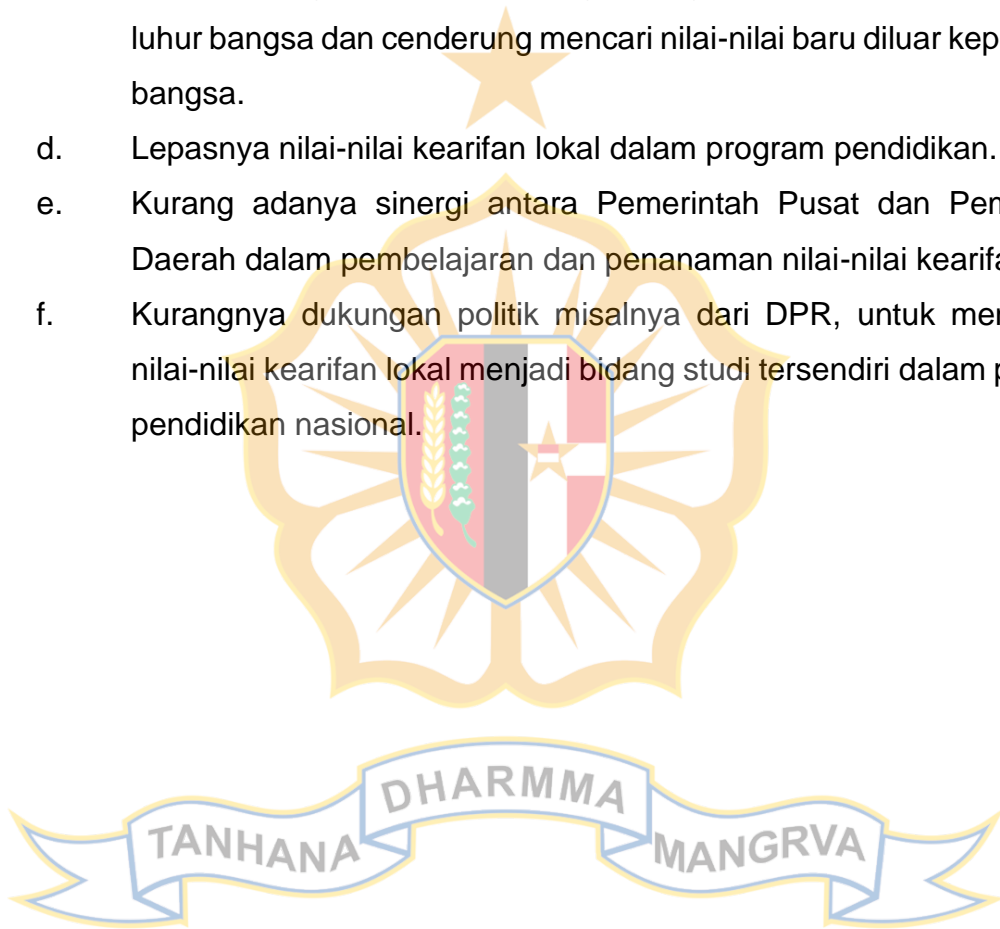
- 5) Sosial Budaya. Dalam aspek sosial budaya, kerukunan antar umat beragama yang merupakan keadaan hubungan antar sesama umat beragama, semestinya dilandasi oleh sikap toleransi, saling menghormati, saling pengertian dan menghargai kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun kenyataannya kehidupan keagamaan di Indonesia saat ini diwarnai oleh sikap intoleransi, dimana satu kelompok cenderung mengklaim kebenarannya sendiri. Di sisi lain munculnya pandemi Covid-19 justru menggugah sebagian kecil masyarakat untuk hidup berdampingan, bergotong royong dan menumbuhkan rasa solidaritas masyarakat lintas agama. Ini terbukti dengan banyaknya bermunculan relawan kemanusiaan dari lintas agama dan kepercayaan untuk membantu saudara-saudaranya yang terkena dampak Covid-19.

Berdasarkan uraian pengaruh lingkungan strategis di atas, maka dapat dianalisa peluang dan kendala terkait dengan implementasi nilai-nilai kearifan lokal terhadap pembangunan nasional. Peluang yang dapat dioptimalkan adalah:

- a. Peran kearifan lokal sebagai sarana dan target dalam pendidikan karakter bangsa.
- b. Indonesia memiliki tradisi dan sumber pengetahuan lokal yang sangat kaya dan hidup.
- c. Pelibatan masyarakat secara langsung untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional.
- d. Posisi Indonesia secara ekonomi maupun geopolitik sangat strategis, sehingga bisa menjadi daya tarik wisatawan mancanegara.
- e. Adanya kemajuan teknologi memiliki peluang untuk mengelaborasi nilai-nilai kearifan lokal dengan kebudayaan modern.

Adapun kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam implementasi nilai-nilai kearifan lokal adalah:

- a. Kurangnya keteladanan yang diperankan oleh orang tua, guru, tokoh masyarakat dan pejabat pemerintah.
- b. Kurangnya peran orang tua dalam membelajarkan nilai-nilai kearifan lokal kepada anaknya, pembelajaran sepenuhnya cenderung diserahkan pada sekolah.
- c. Banyak dari generasi muda yang kurang perhatian terhadap nilai-nilai luhur bangsa dan cenderung mencari nilai-nilai baru diluar kepribadian bangsa.
- d. Lepasnya nilai-nilai kearifan lokal dalam program pendidikan.
- e. Kurang adanya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pembelajaran dan penanaman nilai-nilai kearifan lokal.
- f. Kurangnya dukungan politik misalnya dari DPR, untuk mendorong nilai-nilai kearifan lokal menjadi bidang studi tersendiri dalam program pendidikan nasional.



BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum.

Pembangunan Nasional dan kearifan lokal layaknya dua sisi mata uang yang tidak boleh dipisahkan dalam aplikasinya di lapangan. Pembangunan Nasional merupakan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan kearifan lokal sendiri menjadi benteng bagi bangsa Indonesia agar proses pembangunan yang berjalan tidak melenceng dari nilai-nilai budaya luhur Bangsa Indonesia. Keduanya harus berjalan secara seimbang dan selaras sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Kearifan lokal tentu disesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga pembangunan nasional dapat terus berjalan agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai sesuai dengan amanat undang-undang. Sebaliknya, pembangunan nasional juga harus memperhatikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal agar tidak meninggalkan derita bagi masyarakat dan rusaknya lingkungan yang berakhir dengan timbulnya berbagai bencana alam.

Fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini, pembangunan nasional yang dilakukan sering tidak memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal, sehingga menimbulkan kerugian dan menimbulkan bencana yang akibatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Sekelompok orang yang bertindak sebagai pelaku-pelaku pembangunan hanya berorientasi pada keuntungan semata sehingga memandang sebelah mata nilai-nilai kearifan lokal. Akibatnya bencana kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor seta banjir, telah menjadi pemandangan sehari-hari yang menghiasi berbagai media di Indonesia. Kondisi ini sangat kontraproduktif dengan cita-cita dan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang sekaligus menjadi pedoman dalam pembangunan nasional.

Di sisi lain, gempuran kemajuan teknologi informasi yang dijumpai oleh media sosial secara terus menerus menggerus nilai-nilai kearifan lokal Indonesia. Para generasi muda lebih malu dikatakan sebagai pemuda yang kolot, norak, dan tidak gaul apabila memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal

Indonesia. Dampaknya, banyak generasi muda yang terjebak dalam pergaulan bebas, narkoba, premanisme, dan rela membantah bahkan membunuh kedua orang tuanya sendiri hanya karena keinginannya tidak dipenuhi.

Hal ini tentu sangat memprihatinkan sehingga perlu adanya langkah-langkah yang nyata dan konkret untuk mengimplemantasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Diharapkan dengan memedomani nilai-nilai kearifan lokal, seluruh komponen bangsa dapat mengawal dan menjalankan pembangunan nasional sesuai arah cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945.

Sejalan dengan itu, mengacu kepada Visi Presiden Jokowi untuk mewujudkan Bangsa Indonesia yang maju, mandiri, berdaulat dan berkepribadian berdasarkan gotong royong, maka implementasi nilai-nilai kerarifan lokal sangat diperlukan. Hal ini juga ditegaskan dalam misi beliau di antaranya adalah mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan dan memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.. Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan, diproyeksikan melalui pengembangan kebijakan tata ruang yang terintegrasi, mitigasi perubahan iklim, rehabilitasi lingkungan hidup dan penegakan hukum. Sementara untuk memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa diproyeksikan melalui beberapa kegiatan yaitu: melakukan pembinaan Ideologi Pancasila, revitalisasi revolusi mental, restorasi toleransi dan kerukunan sosial, mengembangkan pemajuan seni budaya dan meningkatkan kepeloporan pemuda dalam memajukan kebudayaan serta mengembangkan olahraga untuk menumbuhkan budaya sportifitas dan berprestasi.

13. **Memahami dan menanamkan nilai-nilai kearifan lokal kepada generasi muda.**

Bung Karno pernah mengatakan: “Berikan aku 1000 orang tua niscaya akan kucabut Gunung Semeru dari akarnya dan berikan aku 1 pemuda niscaya akan kuguncang dunia.” Ungkapan Sang Proklamator Indonesia Bung Karno telah memberikan isyarat betapa pentingnya generasi

muda. Sejarah perjuangan Bangsa Indonesia tidak terlepas dari peran serta para pemuda Indonesia yang hati dan jiwanya dipertaruhkan untuk tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di era reformasi, para pemuda Indonesia mengulang kembali sejarah dengan kekuatannya telah membawa negara Indonesia keluar dari zaman otoriterian menjadi negara yang lebih demokratis. Tentunya hal ini menjadi tanda tanya besar ketika di masa sekarang dengan segala kemajuan teknologi yang berkembang pesat justru pemuda Indonesia tidak terlihat perannya. Yang ada justru para pemuda terlarut dengan budaya barat yang secara masif tersebar melalui media online. Ucapan “norak lu”, “katrok dan tidak gaul” adalah kata-kata yang sering diucapkan kepada sosok pemuda yang gigih memegang nilai-nilai kearifan lokal bangsa.

Teknologi yang berkembang saat ini menyuguhkan gelombang informasi yang dapat diakses secara mudah, cepat, dan murah. Informasi yang masuk menjadi sulit dibendung dan dikontrol. Oleh karena itu, generasi muda saat ini disebut juga sebagai Generasi Z, walaupun sebagian orang masih menyebutnya sebagai Generasi Milenial. Generasi Z merupakan generasi yang lahir di zaman internet dan atau sudah mulai mengalami ketergantungan terhadap internet. Tidak dipungkiri bahwa Generasi Z ini memiliki keunggulan lebih peka terhadap pergaulan global, memiliki pemikiran yang lebih terbuka, lebih cepat terjun ke dalam dunia kerja dan memiliki jiwa wirausaha, serta lebih ramah terhadap teknologi. Namun kekurangan Generasi Z adalah lebih individualisme dan cenderung egois. Dalam kesehariannya generasi muda ini banyak menghabiskan waktu dengan mengakses internet selama tiga sampai lima jam dalam satu hari, sehingga internet ini dapat memengaruhi karakter dan pola hidup mereka. Ketergantungan terhadap teknologi, juga akan menimbulkan beberapa persoalan dalam kehidupan suatu bangsa. Penelitian yang dilakukan oleh Cogan & Derricott (1998: 7), telah mengidentifikasi ada beberapa permasalahan global yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia yang dipengaruhi oleh teknologi. Budaya yang berasal dari bangsa lain dapat memengaruhi bangsa lainya melalui informasi yang begitu masif, baik lewat

media elektronik, media cetak, televisi, dan media sosial lainnya yang akan semakin mempermudah terjadinya proses akulturasi budaya.

Budaya asing yang masuk tanpa diperkuat dengan nilai-nilai kearifan lokal dan pemilahan serta filter yang ketat dapat memengaruhi sikap dan mental generasi muda. Minat generasi muda terhadap kearifan lokalnya sendiri mulai bergeser ke kepada kearifan lokal dari bangsa yang dianggap lebih maju. Dari model busana saja, anak muda lebih berminat berbelanja di mall atau pusat belanja dan pasar modern membeli produk luar seperti Adidas, Nike serta Zara. Kuliner anak muda sekarang juga lebih suka pada makanan yang instan seperti *KFC* dan *McDonald's*. Bahkan dari segi hiburan mereka juga lebih tertarik pada musik dan film bergenre barat dari pada musik dan film tradisional. Proses pencarian jati diri yang dilakukan oleh anak muda akan mengakibatkan mereka mudah terpengaruh oleh budaya asing apabila mereka tidak memiliki fondasi karakter bangsa yang kuat. Anak-anak remaja yang tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai kearifan lokal akan mudah terbawa pengaruh negatif dari arus globalisasi. Perilaku-perilaku yang menyimpang telah dilakukan oleh anak-anak muda, seperti membentuk geng motor, terjebak dalam pergaulan bebas, meminum minuman keras dan obat-obatan terlarang, serta tawuran antar remaja, merupakan bagian dari pengaruh budaya luar yang mereka contoh dari media elektronik. Cara berinteraksi antara anak muda dengan orang tua dan interaksi murid terhadap guru, juga mengalami perubahan. Mereka sudah tidak lagi memerhatikan Tata Krama dalam berinteraksi. Hal tersebut terjadi karena mereka telah terpengaruh oleh budaya hedonisme, sekularisme, dan pragmatisme. Selain berpengaruh terhadap perilaku generasi muda, perkembangan pengetahuan dan teknologi akan berdampak pada perubahan kehidupan dalam masyarakat seperti terjadinya pergeseran nilai budaya dan agama yang mulai mengadopsi nilai-nilai dari bangsa lain yang tidak selalu sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Hal ini akan menimbulkan berbagai penyimpangan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Persoalan-persoalan yang sering terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia saat ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai kearifan lokal mulai luntur di kalangan generasi muda.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengingatkan kepada para remaja dan generasi milenial atau pun Gen "Z" soal bahaya pergaulan seks bebas. Muhadjir mengatakan, bahwa generasi muda Bangsa Indonesia harus diselamatkan dari bahaya pergaulan seks bebas, khususnya di kalangan generasi milenial. Remaja Indonesia harus diselamatkan dari dampak buruk arus globalisasi tersebut," ujar Muhadjir dikutip dari siaran pers, Rabu (4/11/2020).²⁹ Berdasarkan survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Kesehatan pada bulan Oktober 2013, telah menemukan sebanyak 63 persen remaja sudah pernah melakukan hubungan seks bebas. Sementara Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) pada medio 2017 yang dilakukan per lima tahun menunjukkan sekitar 2 persen remaja wanita usia 15-24 tahun dan 8 persen remaja pria pada usia yang sama mengaku telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah.³⁰ Data ini baru dilihat dari segi pergaulan bebas belum menyebutkan indikator negatif lain yang sering kita lihat di televisi nasional. Yang lebih parahnya lagi generasi muda Indonesia lebih mengenal artis artis ketimbang para pahlawan perjuangan bangsa, hal tersebut dapat dilihat dari banyak unggahan dalam media sosial Tiktok sebagai bahan candaan.

Nilai-nilai kearifan lokal yang ada hubungannya dengan konservasi tanah dan air juga mulai tergerus oleh modernisasi dengan membuka lahan baru tanpa memperhatikan lingkungan. Para pengembang, tidak lagi memperhatikan nilai, norma, maupun aturan yang harus ditaati, dan dijaga kelestariannya. Nilai-nilai kearifan lokal yang berhubungan dengan konservasi air dan tanah, dapat berupa nilai-nilai yang diwujudkan dalam praktek ritual dan upacara adat. Atau norma aturan, baik berupa anjuran maupun larangan untuk menggunakan sumber daya air dan tanah secara berlebihan, atau bahkan dapat berupa sanksi bagi yang tidak menaatinya.

²⁹<https://nasional.kompas.com/read/2020/11/04/23000091/menko-pmk-ingatkan-generasi-muda-soal-bahaya-seks-bebas>. Pkl:23.00.

³⁰ Ibid.

Nilai-nilai luhur tersebut berawal dan berasal dari nilai-nilai luhur yang disepakati oleh rakyat penduduk wilayah tertentu.

Keprihatinan terhadap kondisi ini tentu menjadi perhatian seluruh komponen bangsa mengingat tulang punggung pembangunan nasional adalah para generasi muda Indonesia. Diperlukan terobosan, inovasi dan strategi secara konkret untuk memberikan pemahaman dan menanamkan nilai-nilai kearifan lokal kepada generasi muda bangsa sehingga program pembangunan nasional dari pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan pada teori Implementasi yang merupakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang melahirkan dampak atau akibat terhadap sesuatu yang harus dilakukan. Maka dalam rangka memahami dan menanamkan nilai-nilai kearifan lokal dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. **Penanaman Karakter Bangsa berbasis nilai-nilai kearifan lokal di sekolah.**

Sekolah merupakan tempat pendidikan dasar kedua bagi para generasi muda yang memberikan pengaruh besar dalam pembentukan karakter setelah lingkungan keluarga. Waktu yang cukup panjang dan berbagai disiplin ilmu yang diberikan kepada seluruh siswa sebenarnya cukup untuk memberikan bekal positif untuk terjun ke dunia nyata dengan catatan kurikulum dan proses belajar mengajarnya diatur dengan baik. Dalam rangka menanamkan nilai-nilai kearifan lokal kepada generasi muda Indonesia melalui jalur sekolah atau pendidikan formal diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) **Program sekolah berbasis nilai-nilai kearifan lokal.** Sekolah dapat membuat program atau kurikulum yang berbasis pada seni dan nilai-nilai kearifan lokal yang ada. Misalnya ukiran kayu/bambu, membatik dan program berbahasa daerah pada satu waktu. Dengan program sekolah yang berbasis pada seni dan nilai-nilai kearifan lokal berbasis nilai karakter bangsa dapat diperoleh siswa baik secara sadar maupun tidak.

Program yang dilakukan secara terus menerus akan berdampak pada karakter siswa dalam mengenal dan mencintai nilai-nilai kearifan lokal yang ada di lingkungannya.

- 2) **Budaya sekolah.** Budaya sekolah merupakan nilai-nilai, tradisi, prinsip, dan kebiasaan yang terbentuk dalam kegiatan yang berlangsung dan dikembangkan di sekolah serta dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah sehingga akan mendorong munculnya sikap dan perilaku warga sekolah (Zamroni, 2011: 111).³¹ Pendidikan nilai-nilai kearifan lokal dan pendidikan karakter bangsa harus menjadi unsur yang ada dalam budaya sekolah. Nilai-nilai kearifan lokal dapat dikembangkan menjadi 3 unsur budaya sekolah yaitu budaya akademik, kultur sosial budaya lokal dan kultur demokratis dalam mewujudkan pendidikan karakter bangsa berbasis nilai-nilai kearifan lokal.
- 3) **Nilai-nilai kearifan lokal diintegrasikan ke dalam mata pelajaran.** Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai kearifan lokal dapat diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa untuk menanamkan pendidikan karakter bangsa. Penanaman dan pendidikan nilai-nilai kearifan lokal di sekolah menjadi tanggung jawab semua komponen di dalam sekolah termasuk semua guru mata pelajaran. Pendidikan karakter bangsa berbasis nilai-nilai kearifan lokal diintegrasikan ke dalam pembelajaran dengan mengembangkan pendidikan nilai-nilai kearifan lokal dalam setiap pokok bahasan mata pelajaran (Suroto S, 2016).³² Nilai-nilai tersebut dapat dicantumkan secara tersirat maupun tersurat dalam RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) di

³¹ Zamroni. 2011. Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural.. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama.

³² Suroto, S. 2016. Dinamika Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Berbasis Kearifan Lokal Dalam Upaya Memperkuat Karakter Unggul Generasi Muda. Pendidikan Kewarganegaraan, 6(2), 1040-1046

sekolah. Hal ini dilakukan dengan tujuan menanamkan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai kearifan lokal kepada warga sekolah terutama bagi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran dan tujuan membentuk karakter bangsa. Karakter bangsa yang diperkuat terutama lima karakter yaitu: religius, nasionalis, gotong royong, mandiri dan integritas.

4) **Program pengembangan diri peserta didik di sekolah.**

Program pengembangan diri yang berbasis kepada nilai-nilai kearifan lokal dapat dilakukan melalui pengintegrasian ke dalam kegiatan siswa sehari-hari di sekolah. Kegiatan yang dilakukan secara rutin dan berlangsung secara terus menerus diharapkan dapat menjadikan ketauladanan (*modelling*), pembelajaran (*teaching*), penguatan (*reinforcing*) dan pembiasaan (*habituating*) bagi siswa maupun lingkungan sekolah lainnya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah meliputi kegiatan pengondisian, kegiatan rutin, spontan, dan ketauladanan. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut di sekolah diyakini dapat menanamkan dan membentuk karakter bangsa berbasis nilai-nilai kearifan lokal serta merangsang pengembangan diri siswa di sekolah.

b. **Sosialisasi nilai-nilai kearifan lokal melalui media online.**

Saat ini dunia telah memasuki era *Internet of Things* (IOT) di mana seluruh sektor kehidupan banyak menggunakan fasilitas internet. Apalagi di masa pandemi Covid-19 ini, sejak diberlakukan peraturan PSBB oleh pemerintah, semua kegiatan dilakukan melalui jaringan internet. Bisa dikatakan bahwa para generasi muda di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia adalah pengguna internet aktif yang diwujudkan dalam berbagai bentuk aplikasi media sosial seperti *facebook*, *whatsapp*, *youtube*, *Tik Tok*, *twitter* dan lain sebagainya. Momen ini bisa dimanfaatkan untuk terus memberikan edukasi dan pengaruh kepada para generasi muda tentang pentingnya nilai-nilai kearifan lokal melalui internet.

- 1) **Pembuatan Konten yang mengangkat nilai-nilai kearifan lokal dengan memanfaatkan para *youtuber* dan *influencer*.**
Atta Halilintar, Ria Ricis, Rafi Ahmad, Baim Wong, Reza Arap dan sederet selebriti nasional lainnya merupakan nama-nama terkenal yang tidak asing lagi di seluruh lapisan masyarakat khususnya generasi muda. Para *youtuber* tersebut mempunyai jutaan *followers* yang setia menunggu konten-konten yang dibuat. Momen ini dapat dimanfaatkan untuk membuat konten positif yang mengangkat nilai-nilai kearifan lokal di seluruh wilayah Indonesia. Bisa berupa cerita rakyat daerah tertentu, cerita heroik para pahlawan bangsa atau nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang dikemas dalam sebuah cerita yang menarik. Harapannya konten tersebut dapat mengedukasi para generasi muda bangsa untuk terus memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal yang tentunya sangat bermanfaat untuk menyukseskan pembangunan nasional.
- 2) **Produksi film yang mengangkat nilai-nilai kearifan lokal bangsa.** Tayangan film di bioskop-bioskop Indonesia lebih banyak didominasi oleh film-film Hollywood, Bollywood, Hongkong, Tiongkok dan drama Korea secara tidak langsung memengaruhi pola pikir para generasi muda Indonesia. Menyaksikan tayangan film secara kontinyu dan dalam kurun waktu yang lama tentunya akan menimbulkan efek untuk mengadopsi apa yang ada di film tersebut baik secara sadar maupun tidak sadar. Indonesia sendiri sebenarnya mampu menghadirkan film-film berkualitas yang dapat menyedot animo masyarakat khususnya generasi muda dan bahkan saat ini beberapa aktor Indonesia telah bermain di level internasional yang mengenalkan budaya bangsa Indonesia yaitu pencak silat seperti Joe Taslim dan Iko Uwais. Melihat peluang ini, pemerintah melalui Badan Perfilman Indonesia bisa memproduksi film-film layar lebar, Ftv dan film-film pendek yang bernuansa nilai-nilai kearifan lokal serta mengangkat

legenda ataupun sejarah bangsa yang dikemas dengan tampilan milenial. Melalui film ini, kita tidak hanya mengenalkan nilai-nilai kearifan lokal kepada generasi muda kita tetapi juga kepada dunia bahkan bisa menambah nilai devisa negara.

c. **Mengaktifkan kembali organisasi kepemudaan baik tingkat daerah maupun nasional.**

Sesuai dengan teori Organisasi, menurut Robbins,³³ struktur organisasi adalah suatu struktur pembagian tugas pekerjaan yang kemudian dikelompokkan serta dikoordinasikan secara formal. Di dalam organisasi tentu memiliki program-program yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasinya. Berbicara tentang organisasi kepemudaan, Indonesia memiliki berbagai bentuk organisasi yang diisi oleh anak-anak muda baik dari tingkat daerah maupun nasional. Pada masa perang kemerdekaan organisasi kepemudaan memegang peranan vital dalam menyatukan bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jong Java, Jong Sumatera, Budi Utomo dan organisasi lain mampu menggerakkan seluruh pemuda Indonesia untuk saling bahu membahu merebut kemerdekaan meskipun pada masa itu tidak ada media sosial ataupun *hand phone*. Lalu kenapa di era yang serba teknologi justru peran organisasi pemuda di Indonesia tidak terlihat.

Dari tingkat yang paling rendah ada Organisasi Karang Taruna yang di dalamnya berisi pemuda-pemuda di lingkup kampung. Sedangkan di tingkat nasional KNPI, Pemuda Pancasila dan HIPMI adalah beberapa organisasi yang mempunyai nama mentereng di Indonesia, akan tetapi belum terlihat secara konkret perannya. Seharusnya organisasi ini saling bekerja sama untuk turut menanamkan nilai-nilai kearifan lokal kepada para pemuda sesuai dengan bidangnya masing-masing dengan berbagai bentuk kegiatan antara lain:

³³ Stephen P. Robbins. 2003. Perilaku Organisasi. Jakarta: Index.

- 1) **Menggelar Seminar Kepemudaan dari tingkat daerah sampai nasional.** Seminar diselenggarakan dengan mengangkat tema pentingnya memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal bagi pemuda di tengah era globalisasi. Para pembicara dari kalangan pemuda yang mempunyai keberhasilan dan prestasi di berbagai bidang sehingga dapat menarik minat para generasi muda Indonesia. Materi yang disajikan pun harus disamakan antara satu daerah dengan daerah lain melalui organisasi-organisasi pemuda yang ada di daerah. Komunikasi dua arah dalam kegiatan seminar sangat efektif untuk membuka cakrawala dan wawasan para pemuda Indonesia untuk cepat menerima apa yang dibahas dalam kegiatan tersebut. Harapannya seminar ini dapat membentuk *agen of change* untuk menyosialisasikan kepada para pemuda di daerah tentang pentingnya nilai-nilai kearifan lokal.
- 2) **Road Show Budaya.** Inti dari kegiatan ini adalah melibatkan organisasi pemuda untuk *door to door* ke daerah-daerah di Indonesia dalam rangka menyosialisasikan nilai-nilai kearifan lokal kepada para generasi muda bangsa. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam karakteristik nilai-nilai kearifan lokal yang tersebar di seluruh wilayah nusantara, mulai dari Sabang sampai dengan Merauke. Setiap daerah mempunyai nilai-nilai kearifan lokal yang harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh seluruh masyarakat yang mendiami wilayah tersebut. Dengan *Road Show* budaya ini, organisasi-organisasi kepemudaan baik dari daerah maupun dari pusat ikut berperan aktif untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai tersebut.

14. **Implementasi Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam kehidupan sehari-hari.**

Alwasih, et al (2009, hlm. 51) menyebutkan ciri-ciri dari nilai-nilai kearifan lokal adalah sebagai berikut: Berdasarkan pengalaman, teruji setelah digunakan berabad-abad, dapat diadaptasi dengan kultur kekinian,

padu dalam praktek keseharian masyarakat dan lembaga, lazim dilakukan oleh individu atau masyarakat secara keseluruhan, bersifat dinamis dan terus berubah, dan terkait dengan sistem kepercayaan. Sejalan dengan pandangan tersebut, Naritom (Wagiran, 2012, hlm. 330) merumuskan, "*Lokal wisdom is the knowledge that discovered or acquired by lokal people through the accumulation of experiences in trials and integrated with the understanding of surrounding nature and culture. Lokal wisdom is dynamic by function of created lokal wisdom and connected to the global situation.*" (Nilai-nilai kearifan lokal merupakan pengetahuan yang ditemukan atau diperoleh masyarakat lokal melalui akumulasi pengalaman dalam cobaan dan terintegrasi dengan pemahaman tentang alam dan budaya sekitarnya. Nilai-nilai kearifan lokal bersifat dinamis dengan berfungsinya nilai kearifan lokal yang tercipta dan terhubung dengan situasi global). Pengertian ini memberikan penjelasan bahwa nilai-nilai kearifan lokal yang telah dibuat oleh para leluhur bangsa ini masih relevan dan dapat dimodifikasi sesuai dengan perkembangan zaman khususnya di era globalisasi bangsa saat ini. Artinya menjaga nilai-nilai kearifan lokal menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa Indonesia baik pemerintah, pelaku bisnis, masyarakat dan organisasi lainnya.

Secara tertulis ataupun tidak, sebenarnya nilai-nilai kearifan lokal itu telah ada di setiap daerah. Terus terngiang di telinga kita dalam setiap kesempatan pejabat-pejabat Indonesia dalam sambutannya mengucapkan "sebagai bangsa timur yang beradab dan memegang teguh budaya sudah sepatutnya..." Berarti nilai-nilai kearifan lokal itu sudah ada dan terpatri di setiap wilayah Indonesia namun seiring dengan kemajuan jaman implementasinya belum maksimal. Maka sudah menjadi tanggung jawab *stake holder* bangsa untuk mengimplementasikan nilai-nilai kearifan lokal dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung hal tersebut, sesuai dengan teori implementasi dalam kebijakan publik. Menurut Oktasari (2015:1340), Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Jadi implementasi adalah segala tindakan yang dilakukan, baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk

mencapai tujuan yang sudah digariskan dalam keputusan atau kebijakan. Implementasi juga berkaitan dengan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang melahirkan dampak atau akibat terhadap sesuatu yang harus dilakukan. Sesuatu tersebut bisa berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Berangkat dari teori tersebut, maka untuk mengimplementasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan nasional diperlukan sarana, tindakan dan usaha untuk mewujudkannya. Mengacu kepada teori manajemen yang memuat aspek perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan serta pengawasan, maka dalam mengimplementasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan sebagai berikut: Perencanaan dilakukan secara menyeluruh dengan melihat fakta yang ada dan asumsi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Pengorganisasian dibuat mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Pelaksanaannya harus terpadu dan didukung oleh sumber daya yang cukup, baik SDM maupun sumber daya pendukung lainnya. Pengawasan dilakukan oleh semua pihak baik pemerintah maupun rakyat agar terjadi keseimbangan dan keterbukaan demi kepentingan bersama bangsa Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan teori kerja sama bahwa setiap bagian kelompok memiliki rasa tanggung jawab dan saling berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu berdasarkan teori implementasi kebijakan publik, dalam implementasi nilai-nilai kearifan lokal juga diperlukan suatu kebijakan yang mengikat semua unsur agar nilai-nilai kearifan lokal tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- a. **Menegakkan nilai-nilai kearifan lokal bangsa melalui peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh seluruh *stake holder* bangsa.** Peraturan adalah sarana yang cukup efektif untuk meletakkan tujuan atau goal pada relnya. Dengan instrument yang tertera dalam suatu aturan memungkinkan obyek mengikuti dengan taat karena ada konsekuensi yang konkret apabila tidak melaksanakannya. Demikian juga halnya dengan nilai-nilai kearifan lokal. Untuk menjaga marwah

hal tersebut, diperlukan payung hukum yang jelas sebagai arahan dan petunjuk bagi setiap warga negara Indonesia.

- 1) **Pemerintah Pusat.** Secara yuridis formal nilai-nilai kearifan lokal telah diperkenalkan dalam Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yang menyatakan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.³⁴ Dalam undang-undang tersebut juga telah diperkenalkan asas kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia, yaitu bahwa dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memerhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Disamping itu, salah satu pertimbangan pada UU No 32 Tahun 2009 ini adalah bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.³⁵

Secara gamblang peraturan perundang-undangan di atas menyebutkan bahwa pembangunan nasional harus memperhatikan dan selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal suatu wilayah. Penjabaran secara teknik di lapangan aturan-aturan tersebut telah dijabarkan dengan baik oleh pemangku kepentingan. Sebagai contoh dalam hal perijinan tambang, seluruh pengusaha harus memenuhi segala macam ketentuan, salah satunya adalah masalah lingkungan hidup (Amdal). Namun terkadang ada beberapa oknum yang justru memanfaatkan aturan untuk memperoleh keuntungan pribadi yang mengakibatkan berbagai permasalahan timbul di masyarakat. Maka sudah sepatutnya pemerintah pusat yang

³⁴ <https://studylibid.com/doc/618780/pembangunan-hukum-berbasis-kearifan-lokal>. Hendra Wahanu Prabandani.

³⁵ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-32-2009-perlindungan-pengelolaan-lingkungan-hidup>.

secara langsung berkecimpung dalam pembuat dan penegak aturan harus konsisten untuk merealisasikan apa yang telah menjadi keputusan. Hilangkan niat untuk mencari keuntungan pribadi demi tercapainya kesejahteraan bangsa Indonesia melalui pembangunan nasional.

Pemerintah dan juga didukung oleh masyarakat harus betul-betul melaksanakan kontrol dan pengawasan yang melekat terhadap oknum-oknum yang menjual program pembangunan untuk mengeruk keuntungan pribadi dengan memainkan aturan yang telah dibuat. Apabila kondisi ini berhasil diwujudkan maka pembangunan nasional yang didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal akan terwujud yang pada akhirnya tujuan bangsa dapat tercapai dengan baik.

- 2) **Pemerintah Daerah.** Setali tiga uang (tidak ada bedanya) dengan apa yang terjadi di pemerintah daerah. Inkonsistensi terhadap aturan yang telah dibuat kerap terjadi, terlebih lagi apabila dihadapkan dengan keuntungan materi yang cukup besar dari suatu proyek pembangunan. Kepala daerah yang tertangkap OTT oleh KPK menunjukkan bahwa sampai dengan level pemimpin saja masih sangat mudah dibeli dengan uang. Pemerintah daerah sebagai kepanjangan dari pusat harus berani menegakkan aturan yang berlaku.

Ketika program pembangunan yang akan dilaksanakan bertentangan dengan *local wisdom* setempat maka dengan tegas evaluasi dan temukan solusi yang bijak. Bukan malah merubah aturan atau melaksanakan usaha lain untuk meloloskan proyek tersebut hanya karena tumpukan kertas bergambarkan dolar. Lebih ekstrimnya lagi agar konsistensi pemerintah dalam mengawal nilai-nilai kearifan lokal tetap terjaga pada masa pembangunan nasional ini, jika perlu merubah sistem pemilihan kepala daerah. Konyol memang apabila dipikir secara teoritis karena mencederai demokrasi tapi bila dilihat dengan hati nurani dan akhlak output kepala

daerah yang dihasilkan dari pola sekarang ini sangat rendah, karena motifnya hanya ingin mengembalikan materi yang telah dikeluarkan pada masa kampanye.

- 3) **Aparat Penegak Hukum.** Komponen ini memainkan peranan utama dalam menegakkan segala bentuk peraturan perundang-undangan yang telah digulirkan baik yang berlaku nasional maupun daerah. Kejaksaan, KPK dan Kepolisian adalah lembaga-lembaga yang harus konsisten dan teguh dalam mengawal apa yang menjadi kebijakan negara termasuk didalamnya bagaimana menjaga nilai-nilai kearifan lokal di era pembangunan dan globalisasi seperti sekarang ini. Tindak tegas terhadap pelaku-pelaku bisnis dan oknum pemerintahan yang memainkan aturan yang sudah ada hanya untuk kepentingan pribadinya. Karakter dan masa depan bangsa lebih utama dibandingkan dengan mengamankan kepentingan perseorangan atau kelompok yang akibatnya menyengsarakan bangsa Indonesia.
- 4) **Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Ruang.** Partisipasi dapat diartikan sebagai peran serta atau keikutsertaan dalam suatu kegiatan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pengawasan. Partisipasi masyarakat dalam suatu proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat digolongkan sebagai partisipasi politik. Partisipasi politik sebagai bagian dari kegiatan warga negara sipil yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok secara aktif dalam penentuan kebijakan publik atau peraturan perundang-undangan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam penataan ruang adalah kegiatan masyarakat untuk melaksanakan negosiasi dalam proses perumusan kebijakan, terutama yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Selain memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengetahui sejak awal kemungkinan implikasinya dari pembentukan peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat juga diperlukan guna memastikan bahwa kepentingan masyarakat tidak diabaikan oleh pembuat peraturan. Terlebih lagi bahwa pada hakikatnya seluruh regulasi yang dibuat diarahkan kepada terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku di masyarakat.

5) **Melaksanakan pembangunan berdasarkan kepada RTRW Nasional.** Dalam pasal 1 ayat (9) RTRW Nasional dinyatakan bahwa dalam perencanaan pembangunan harus memperhatikan kawasan lindung. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Maka dalam implementasinya harus berpedoman kepada RTRW Nasional dengan mengikutsertakan nilai-nilai kearifan lokal di dalamnya.

b. **Mengaktifkan pranata dan lembaga sosial di daerah.** Pranata sosial merupakan suatu sistem tata kelakuan dalam hubungan yang berpusat kepada aktifitas-aktifitas untuk memenuhi berbagai kebutuhan khusus dalam masyarakat.³⁶ Beberapa ahli sosiologi mengartikan pranata sosial dengan istilah yang berbeda-beda, beberapa di antaranya mengemukakan bahwa pranata sosial adalah lembaga sosial, lembaga kemasyarakatan ataupun bangunan sosial. Pranata sosial dapat diartikan sebagai seperangkat aturan dalam suatu kegiatan sosial yang berhubungan dengan sosial masyarakat dan kepedulian terhadap masyarakat serta kepedulian terhadap kepentingan umum. Joseph S. Rucek dan Roland L. Warren menjelaskan bahwa pranata sosial merupakan pola-pola yang mempunyai kedudukan tetap untuk memenuhi berbagai kebutuhan

³⁶ <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pranata-sosial/>. Parta Setiawan. 4 April 2021.

manusia, yang muncul dari kebiasaan-kebiasaan dengan mendapatkan persetujuan dan cara-cara yang sudah tidak dipungkiri lagi untuk memenuhi konsep kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan suatu struktur di masyarakat.³⁷

Kemudian timbul pertanyaan apakah pranata dengan lembaga sosial itu sama? Tentu saja dua hal yang berbeda. Pranata lebih cenderung kepada norma-norma atau aturan yang berlaku di masyarakat sedangkan lembaga sosial adalah wadah ataupun tempat dari aturan-aturan tersebut. Nilai-nilai kearifan lokal di suatu daerah merupakan bagian dari pranata sosial itu sendiri yang harus dijaga dan dilestarikan bersama. Sebenarnya pranata dan lembaga-lembaga tersebut telah ada di seluruh wilayah Indonesia dengan ciri khasnya masing-masing untuk membentengi masyarakat dari arus globalisasi yang tak terbendung. Namun fenomena di negeri ini sungguh miris, pasalnya lembaga sosial yang ada di masyarakat justru salah orientasi ketika dihadapkan dengan projek pembangunan. Lembaga yang seharusnya menjaga marwah kearifan lokal justru menggunakannya untuk menggerogoti pelaku bisnis agar mendapatkan uang. Berbagai lembaga sosial yang mengatas namakan LSM banyak memberikan masukan ketika suatu projek pembangunan bertentangan dengan lingkungan alam namun koreksi itu tidak untuk menjadi perbaikan namun sebagai sarana menekan pengusaha agar mendapatkan profit secara pribadi.

Berbagai potret kehidupan sebagaimana gambaran tersebut di atas sudah sangat melenceng dari tujuan sebenarnya. Maka perlu diaktifkan dan diingatkan kembali berbagai bentuk pranata dan lembaga sosial di masyarakat untuk kembali pada marwah yang sebenarnya. Sebagai contoh adalah pulau Bali. Pulau yang dikenal dengan sebutan Dewata ini dikenal mempunyai keindahan alam yang luar biasa sehingga menarik banyak wisatawan mancanegara. Beribu-ribu orang asing dengan variasi budayanya dan berbagai

³⁷ Ibid.

pembangunan di sektor wisata (hotel, tempat hiburan, dll) masuk ke Bali namun sampai dengan saat ini masyarakat Bali masih memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal, terlebih lagi ketika berkaitan dengan alam. Kuncinya adalah masyarakat Bali memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal seperti Tri Hita Karana; Tri Kaya Parisudha; Paras-Paros; Segalak Segilik Seguluk; Tatas Tetes; Merakpak Danyuh; Pupuh Ginada “Eda Ngaden Awak Bisa”³⁸. Nilai-nilai kearifan lokal Tri Hita timbul karena termanifestasi dalam nilai karakter bangsa Indonesia yaitu loyalitas, kejujuran, dapat diandalkan, hormat, tidak egois dan perduli, baik hati dan pertemanan, keberanian, mandiri dan potensial, disiplin diri dan moderasi, kesetiaan dan kemurnian, keadilan, cinta dan kasih sayang³⁹. Disamping itu Bali juga mempunyai Pecalang yaitu organisasi adat yang bertugas untuk menjaga dan menegakkan nilai-nilai kearifan lokal di Bali yang tidak segan-segan memberikan tindakan kepada para pelanggar adat.

Sebenarnya pranata dan lembaga sosial masyarakat juga dimiliki wilayah lain dengan karakter dan ciri khas masing-masing. Namun implementasinya belum terlihat seperti apa yang saat ini telah berjalan di Bali. Maka langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengaktifkan pranata dan lembaga sosial di daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Menyeleksi dan mengontrol secara ketat peran lembaga sosial di masyarakat. Data-data lembaga sosial sebenarnya telah dimiliki oleh Kesbangpol daerah namun fungsi kontrolnya belum maksimal. Artinya pemerintah daerah harus berani untuk membubarkan lembaga sosial yang menghambat pembangunan nasional dengan memeras para pelaku bisnis. Namun sebaliknya pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada lembaga sosial yang berani memberikan masukan

³⁸ <https://lppm.undiksha.ac.id/senadimas2020/assets/ProsidingSenadimas2020/file/233.pdf>.

³⁹ Muslich, K. 2013, *Nilai-nilai universal Agama-agama di Indonesia menuju Indonesia Damai*. Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, hal. 69.

terkait pelaksanaan proyek pembangunan yang tidak mengindahkan nilai-nilai kearifan lokal.

- 2) Perlu dibentuk organisasi yang berfungsi menegakkan dan menjaga pranata sosial yang telah dibuat di suatu wilayah seperti di Bali. Peran organisasi ini sangat efektif karena anggotanya adalah masyarakat setempat sehingga memahami betul apa yang seharusnya dilakukan dan dilarang di daerah tersebut.
- 3) Melibatkan peran lembaga sosial dalam perencanaan pembangunan. Setiap tahunnya pemerintah daerah membuat perencanaan pembangunan daerah yang dikemas dalam Musrenbang. Seluruh stake holder yang ada diundang untuk membahas hal tersebut. Tentunya hal ini menjadikan peluang ketika lembaga sosial diundang untuk memberikan masukan ketika pemerintah mempunyai rencana membangun suatu wilayah. Fokusnya adalah pembangunan yang dilakukan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat sehingga perencanaan yang dibuat lebih matang dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

- c. **Memaksimalkan peran pengusaha lokal dalam proses pembangunan.** Pengusaha tentunya memiliki peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Meskipun berperan penting namun tidak semua pengusaha memiliki kepedulian terhadap nilai-nilai kearifan lokal, karena yang ada dibenaknya hanya bagaimana mendapat keuntungan semata. Untuk menghindari hal tersebut, pemerintah daerah selayaknya memberikan kesempatan dan prioritas kepada pengusaha lokal untuk mengerjakan proyek pembangunan yang ada di wilayahnya. Keuntungannya adalah para pengusaha telah mengerti dan memahami betul kondisi serta karakteristik masyarakat, kearifan lokal yang berlaku sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam hal ini, apabila suatu proyek pembangunan harus dikerjakan oleh pengusaha di luar daerah, maka klausul atau pernyataan untuk menghormati nilai-nilai kearifan lokal masyarakat dimasukkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh pemerintah daerah dan pengusaha. Artinya dengan adanya nota kesepakatan tersebut, pemerintah dapat dengan mudah mengawasi dan mengontrol selama proses pembangunan berlangsung. Sedangkan dari sisi pengusaha sendiri tentunya perjanjian ini sebagai petunjuk atau koridor untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kearifan lokal.

15. **Implementasi nilai-nilai kearifan lokal dalam mengantisipasi dan menghadapi bencana guna mendukung pembangunan nasional.**

Indonesia yang terletak di Cincin Api Pasifik (wilayah dengan banyak aktivitas tektonik), harus terus siaga dalam menghadapi resiko bencana letusan gunung berapi, gempa bumi dan tsunami serta banjir. Pada beberapa kejadian selama kurun waktu 20 tahun terakhir, Indonesia menjadi topik utama atau *headline* di media dunia internasional akibat beberapa kejadian bencana alam yang sangat mengerikan dan menyebabkan kematian jutaan makhluk hidup, serta menghancurkan wilayah daratannya (termasuk banyak infrastruktur yang terkena imbasnya sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi). Bencana alam selama ini selalu dipandang sebagai *force majeure* (keadaan yang memaksa), yaitu suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan atau kontrol manusia dan tidak dapat dihindarkan. Namun perlu diketahui bahwa bencana yang terjadi juga disebabkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Ribuan hektar hutan Indonesia gundul yang menyebabkan timbulnya banjir dan tanah longsor hanya untuk menarik keuntungan. Kekayaan alam Indonesia sebagai anugerah sang pencipta telah diikuti aturan-aturan atau nilai-nilai kearifan dalam proses penciptaannya. Apabila hal tersebut dipedomani sebagai suatu hal yang sakral dan harus dijaga niscaya bencana tidak akan terjadi. Kenyataannya, keserakahan manusia telah mengalahkannya.

Disisi lain kecanggihan teknologi di masa sekarang ini semakin mengikis isyarat alam yang telah lama digunakan oleh nenek moyang bangsa Indonesia sebagai tanda terjadinya bencana alam. Kaum akademisi menganggap nilai-nilai kearifan lokal yang digunakan sebagai *early warning system* akan terjadinya bencana hanya sebuah tahayul yang sudah tidak relevan. Jargon yang selalu diucapkan adalah “hari gini masih percaya dengan hal seperti itu.” Padahal teknologi yang dibuat juga hasil karya manusia yang 100 % bisa mengalami kerusakan. Secara nyata telah digambarkan beberapa rangkaian peristiwa bencana yang terjadi di negeri ini bisa dimitigasi hanya dengan berpedoman pada nilai-nilai kearifan lokal daerah. Sebagaimana yang terjadi pada komunitas masyarakat adat di Simeulue yang secara fantastis membuat minimnya jumlah korban akibat tsunami pada tahun 2004, padahal wilayahnya berhadapan langsung dengan lautan. Simeulue sebuah pulau dan sebuah nama kabupaten di Provinsi Aceh tercatat hanya 6 orang yang meninggal akibat bencana tersebut.

Seluruh dunia telah dibuat heran dengan minimnya jumlah korban di Pulau Simeulue akibat Tsunami, karena Simeuleu telah berpedoman pada nilai kearifan lokal di wilayahnya yang dikenal dengan nama Smong. Nilai kearifan lokal Smong telah ada sejak 1907 dan telah terbukti mampu menyelamatkan puluhan ribu jiwa saat terjadi tsunami pada 26 Desember 2004. Nilai kearifan lokal Smong memiliki hubungan dengan mitigasi bencana tsunami secara tradisional. Tradisi Smong telah disampaikan melalui puisi-puisi yang terkandung dalam cerita rakyat, lagu pengantar tidur, atau senandung yang telah diperkenalkan kepada keturunan mereka sejak dari lahir sampai usia tua. Nilai kearifan lokal ini terbukti sangat efektif mengingat pada saat itu belum ada sistem peringatan dini terhadap ancaman bencana tsunami di pulau tersebut.⁴⁰ Simeulue memiliki kearifan lokal bernama Smong, di Pariaman, Sumbar juga memiliki tradisi yang bernama “Hoyak Tabuik” (prosesi mengguncang patung Tabot). Tradisi ini

⁴⁰ Gadeng, A.N., Maryani, E Rochmat, D, 2018. *The Value of Local Wisdom Smong in Tsunami Disaster Mitigation in Simeuleue Regency, Aceh Province*. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 145, hal. 1-6.

terimplementasi dengan menanam pohon cemara dan mangrove di pesisir pantai, serta keyakinan akan terlindungi oleh pulau-pulau kecil di sekitar laut Kota Pariaman. Tradisi yang dilakukan masyarakat Kota Pariaman sebagai antisipasi dalam mitigasi bencana tsunami dan gempa bumi di kota pariaman.⁴¹ Lain Simeulue, lain Pariaman, namun keduanya telah mencontohkan bagaimana melindungi nilai-nilai kearifan lokal di daerahnya masing-masing. Masih banyak lagi nilai-nilai kearifan lokal di setiap daerah tentang mitigasi bencana dan memelihara bumi ibu pertiwi. Tentu setiap daerah memiliki kekhasan dan ciri masing-masing sesuai karakter daerahnya.

Berdasarkan pengalaman sejarah, bencana juga merupakan suatu kejadian alam yang berulang. Sebagaimana peristiwa bencana alam tsunami yang terjadi beberapa tahun lalu, juga pernah terjadi pada ratusan tahun lalu. Menurut mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI (Pur) Doni Monardo pernah mengatakan bahwa bencana alam bukanlah hukuman Tuhan, akan tetapi merupakan kejadian alam yang berulang. Oleh karenanya, kita harus menjaga alam, agar alam juga menjaga kita. Yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapi bencana tersebut dan bagaimana kesungguhan pemerintah untuk menyiapkan masyarakat agar siaga terhadap bencana. Pun demikian, kejadian banjir yang berulang-ulang di beberapa daerah adalah akibat keteledoran manusia yang tidak peduli terhadap alam dan lingkungannya. Padahal neneng moyang kita telah mewariskan nilai-nilai luhur kearifan lokal dalam menjaga bumi pertiwi ini.

Berlatar belakang dari apa yang telah digambarkan di atas, tampak jelas bahwa nilai-nilai kearifan lokal di daerah yang diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia masih sangat relevan untuk memitigasi bencana alam di Indonesia. Sejauh ini dalam UU No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, tidak diatur bagaimana nilai-nilai kearifan lokal di berbagai daerah dimanfaatkan dalam penanggulangan bencana.

⁴¹ Mustofa, Bisri dan Maharani, Elisa Vindi, Kamus Lengkap Sosiologi, Yogyakarta: Panji Pustaka, 2008. Hal. 71.

Maka perlu adanya langkah-langkah untuk mempertahankan dan mengimplementasikan hal tersebut yang kesemuanya tidak terlepas dari teori budaya, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. **Pembangunan Nasional berbasis Etika Lingkungan Hidup.**

Manusia sebagai bagian dari makhluk hidup penghuni bumi ini memiliki hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Untuk mencapai kesejahteraan hidupnya, manusia berusaha memanfaatkan sumber daya lingkungan yang ada. Sebagian dari kita mempunyai cara pandang yang berbeda dan keliru terhadap sumber daya alam, sehingga segala tindakannya dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Di pihak lain ada pula kelompok orang yang berusaha melakukan pembangunan dengan mengejar angka pertumbuhan ekonomi dengan memproduksi sebanyak-banyaknya, sehingga eksploitasi dan eksplorasi lingkungan alam tak dapat dihindarkan.

Dalam rangka mengatasi permasalahan lingkungan, maka paradigma pembangunan nasional perlu diubah agar sumber daya yang ada tidak punah atau tidak hanya dinikmati oleh generasi sekarang saja, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai bekal hidup generasi mendatang. Dengan kata lain pembangunan nasional harus dilakukan secara berkelanjutan. Pembangunan nasional yang berkelanjutan (*sustainable development*) memerlukan landasan etika/nilai dan moral agar setiap orang dapat mendukungnya. Landasan nilai dalam pembangunan nasional tersebut adalah etika lingkungan. Etika lingkungan mempunyai daya kontrol dan kendali yang baik bagi setiap tindakan manusia terhadap lingkungannya apabila terjadi perubahan tindakan (*moral action*), pola pikir (*moral thinking*), dan sikap moral (*moral affective*). Apabila etika lingkungan ini telah dibangun dan diinternalisasikan dalam diri setiap manusia, maka pembangunan yang berkelanjutan tidak akan mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.

Membangun etika lingkungan dapat dilakukan melalui pendidikan, baik pendidikan formal (sekolah) maupun nonformal (keluarga dan masyarakat). Pembangunan nasional yang berbasis

pada etika lingkungan hidup, diperlukan guna menjaga keberlanjutan kelestarian ekologi dan sosial budaya masyarakat, serta demi menjamin kualitas kehidupan yang lebih baik dalam arti yang luas.

- b. **Mendokumentasikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai mitigasi bencana di daerah.** Nilai-nilai kearifan lokal yang dikenal sebagai isyarat alam yang memberikan tanda-tanda akan terjadinya bencana alam merupakan warisan leluhur yang diturunkan dari generasi ke generasi tanpa ada catatan yang nyata. Ketika era globalisasi merambah hampir di seluruh wilayah Indonesia, gaya hidup masyarakat mulai berubah. Para generasi muda enggan untuk mempercayai apa yang telah digariskan oleh leluhurnya karena menganggap peradaban yang kolot dan bukan jamannya lagi. Apabila kondisi ini terus berlanjut maka secara perlahan tapi pasti nilai-nilai tersebut akan hilang ditelan bumi. Pemerintah daerah sampai dengan pimpinan terendah setingkat lurah, kepala desa dibantu dengan tokoh adat harus segera mengambil tindakan dengan menulis nilai-nilai kearifan lokal di wilayahnya. Catatan-catatan ini juga didistribusikan ke BPBD sehingga dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengatasi munculnya bencana dengan mengombinasikan antara teknologi dan nilai kearifan lokal. Disamping itu, sosialisasi kepada seluruh generasi muda tetap harus dilakukan secara terus menerus sebagai usaha untuk melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang ada.
- c. **Mengelaborasi dan mengolaborasikan kecanggihan teknologi dan nilai-nilai kearifan lokal.** Mbah Marijan adalah tokoh fenomenal pada peristiwa erupsi gunung Merapi beberapa tahun yang lalu. Disaat para ahli menyatakan akan terjadi erupsi besar di Merapi dari hasil pengamatan teknologi, justru Mbah Marijan dengan santainya berucap tidak akan meninggalkan Merapi karena dirinya sudah mendapat amanat dari sultan. Sontak sikap beliau juga diikuti oleh sebagian warga yang mendiami lereng gunung Merapi. Artinya nilai-nilai kearifan lokal yang disimbolkan oleh seorang tokoh adat yang memiliki pengetahuan tentang isyarat alam cukup berpengaruh bagi

masyarakat. Inilah yang harus dikelola dengan baik oleh seluruh pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk mengatasi bencana alam.

BPBD selaku penanggung jawab penanganan bencana di daerah dan dibantu oleh jajaran TNI/Polri di wilayah harus mengelaborasi dan mengolaborasikan teknologi dan nilai-nilai kearifan lokal sebagai *early warning system* bencana. Kedua instrumen itu saling keterkaitan satu sama lain, kecanggihan teknologi tidak menjadi jaminan bisa akurat mendeteksi adanya bencana karena dikhawatirkan alat tersebut rusak. Dan sebaliknya, masyarakat hanya bersandar pada kearifan lokal juga keputusan yang tidak tepat. Sehingga dua hal ini harus dielaborasi dan dikolaborasikan untuk saling mendukung satu sama lainnya. Dalam hal uji coba atau simulasi bencana, juga harus dilaksanakan secara beriringan. Artinya antara kecanggihan teknologi dan tanda isyarat alam, keduanya sebagai bagian dari kearifan lokal wajib disimulasikan oleh seluruh masyarakat yang mendiami wilayah rawan bencana. Lebih baik mencegah daripada jatuh korban, hilangkan logika berpikir ketika dihadapkan dengan nilai-nilai kearifan lokal karena sesuatunya terkadang berada diluar nalar dan benar-benar terjadi. Yang harus dilakukan hanya hormati, hargai dan pedomani nilai-nilai tersebut karena pasti ada manfaat di dalamnya.

- d. **Melarang pembangunan di tempat/wilayah yang dihormati masyarakat.** Setiap wilayah di Indonesia tentunya memiliki tempat yang paling dihormati oleh masyarakatnya. Nilai-nilai kearifan lokal yang turun temurun ini begitu dijaga karena diyakini apabila dirusak akan mendatangkan bencana bagi masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Aneh memang apabila dikaitkan dengan logika berpikir di era globalisasi seperti sekarang ini, tapi kenyataannya itulah yang terjadi. Maka dalam proses pembangunan yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, para pelaku bisnis harus betul-betul memperhatikan hal tersebut. Pemerintah daerah bertindak tegas dengan tidak memberikan ijin pembangunan di wilayah yang dihormati oleh masyarakat sekalipun diiming imingi uang. Masyarakat juga

konsisten untuk terus melestarikan dan menjaga tempat tersebut. Apabila situasi ini terus berjalan maka bencana alam yang diakibatkan oleh ulah manusia seperti kebakaran hutan, tanah longsor akibat hutan gundul, banjir yang diakibatkan aktivitas tambang tidak akan pernah terjadi.

- e. **Mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal dalam membangun fasilitas di daerah rawan bencana.** Indonesia memiliki beragam suku dan budaya, yang sering disebut sebagai nilai-nilai kearifan lokal. Nilai-nilai kearifan lokal dapat ditemui di berbagai wilayah Indonesia dan menunjukkan betapa kayanya bangsa Indonesia atas keberagaman budaya. Dari letak geografis, Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng besar yaitu Pasifik, Eurasia dan Indo-Australia sehingga berdampak terhadap tingginya potensi bencana. Pergeseran lempeng akan menyebabkan pergerakan tanah dan akan mengakibatkan bencana gempa bumi. Jika mengacu pada data BMKG, sepanjang tahun 2019 saja di Indonesia telah terjadi 11.573 gempa bumi (Lihat Tabel 1 dan Tabel 2). Tingginya potensi bencana ini telah memaksa para leluhur bangsa Indonesia untuk belajar bagaimana cara menghadapi atau memitigasi bencana. Dari pengalaman hidup nenek moyang kita dalam mengatasi bencana alam tersebut diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Cara tersebut menjadi satu budaya yang terbalut dalam nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia yang hingga saat ini masih dipelihara dan dipraktikkan oleh sebagian masyarakat di Indonesia.

Mitigasi bencana yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal di Indonesia bisa dilihat dari arsitektur Rumah Gadang di Sumatera Barat yang dibuat tanpa menggunakan paku, tapi menggunakan pasak kayu untuk meminimalisir dampak gempa bumi. Suku Baduy di Banten, juga mempertahankan nilai-nilai kearifan lokalnya dalam menghadapi gempa bumi, yaitu dengan membuat pikukuh atau aturan adat dan larangan dalam mendirikan rumah. Dimana, bahan bangunan yang dipakai adalah bahan-bahan yang lentur, seperti ijuk, kiray dan bambu. Rumah yang dibangun juga tidak boleh didirikan

langsung menyentuh tanah. Hal tersebut dilakukan agar rumah tidak mudah roboh, sehingga wilayah yang didiami oleh suku baduy jarang sekali mengalami kerusakan ketika terjadi gempa bumi. Dalam proses pembuatannya sama dengan yang dilakukan oleh Suku Minang atau Suku Dayak di Kalimantan, rumah tidak boleh menggunakan paku, tapi hanya menggunakan pasak dan tali ijuk. Semua nilai-nilai kearifan lokal untuk mitigasi bencana gempa bumi tersebut merupakan khazanah bagi bangsa Indonesia yang harus dipertahankan dan dilestarikan.

Belum ada teknologi dan sekolah dengan berbagai disiplin ilmu namun nenek moyang bangsa Indonesia mampu mempertahankan diri dari berbagai bentuk bencana. Pada masa sekarang ini dimana kecanggihan teknologi meningkat pesat justru banyak mengaburkan nilai-nilai kearifan lokal. Masyarakat cenderung membangun rumah yang megah untuk meningkatkan status sosialnya padahal jelas-jelas tempat yang didiami rawan terjadi bencana. Seharusnya kaum milenial ini tidak perlu malu untuk mengadopsi apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang terdahulu tetapi dikemas lebih baik sehingga terlihat juga kesan modernnya. Berkaca dari apa yang diulas di atas, seyogyanya masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah yang mendiami wilayah yang rawan terhadap bencana, mengadopsi apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang dalam membangun sarana dan prasarana di daerahnya. Dengan mengadopsi sistem tersebut diharapkan tingkat keselamatan masyarakat cukup tinggi ketika terjadi bencana.

- f. **Jaga Alam, Alam pun akan menjaga kita.** Sebuah kalimat atau ungkapan yang sangat bijak “ Jaga Alam, Alam Jaga Kita”, kalimat pendek yang sering diungkapkan oleh mantan Kepala BNPB, mungkin perlu terus digaungkan kepada anak cucu kita agar alam ini tetap terjaga dan terhindar dari bencana. Seluruh warga masyarakat diminta untuk terus menjaga alam agar alam tetap lestari, ijo royo-royo, sehingga tidak berpotensi memicu terjadinya bencana alam seperti kebakaran hutan lahan, tanah longsor dan banjir. Dengan

demikian kondisi alam lingkungan menjadi nyaman untuk dihuni, alam pun akan menjaga kita terhindar dari musibah bencana.

Untuk menjaga alam tidak bisa hanya mengandalkan kesadaran masyarakat belaka tetapi dibutuhkan juga kebijakan publik yang memaksa dan mengikat semua unsur. Sebagai contoh, kebijakan publik pernah dikeluarkan oleh pemerintah dalam menangani daerah aliran sungai (DAS) Citarum, Jabar. Arah kebijakan dalam menangani DAS Citarum merujuk pada kebijakan yang tertuang dalam Perpres No. 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum, yaitu Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran DAS dan/atau Kerusakan DAS, serta Pemulihan Fungsi DAS.⁴² Masih banyak kebijakan lain yang dibuat dan dikeluarkan oleh pemerintah, hanya saja dibutuhkan kesadaran semua unsur untuk melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Beberapa program dan kebijakan yang dikeluarkan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah diharapkan mampu memberikan arah dan tindakan bagi masyarakat dan semua unsur dalam menjaga alam, ibu pertiwi tempat kita berpijak.



⁴² Satgas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum. 2018. Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum 2019 – 2025. Pemprov Jabar.

BAB IV PENUTUP

16. **Simpulan.**

Melanjutkan dari apa yang telah dijelaskan, Taskap ini menegaskan bahwa nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dan berkembang di masyarakat lokal harus dijadikan sebagai sumber utama dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Memproyeksikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai nilai kekolotan, usang dan terbelakang, sangatlah tidak produktif. Ia justru memiliki nilai-nilai luhur untuk diaplikasikan atau diimplementasikan oleh generasi penerus bangsa pada konteks kekinian, sehingga pembangunan nasional yang berkelanjutan dapat terwujud. Nilai-nilai kearifan lokal, tidak hanya memiliki potensi tapi juga menjadi syarat utama untuk efektifitas dan produktifitas pembangunan nasional. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Nilai-nilai kearifan lokal perlu ditanamkan kepada generasi muda melalui program penanaman karakter bangsa di sekolah, melaksanakan sosialisasi nilai-nilai kearifan lokal media online serta mengaktifkan kembali organisasi kepemudaan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.
- b. Dalam rangka menjaga agar pembangunan nasional tetap pada koridor nilai-nilai kearifan lokal, perlu dilakukan beberapa inovasi seperti membuat aturan-aturan yang dikeluarkan baik oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah. Kebijakan yang dibuat dalam rangka menghormati nilai-nilai kearifan lokal setempat dan mengaktifkan peran lembaga dan pranata sosial serta mengedepankan peran pengusaha lokal dalam proses pembangunan di daerah.
- c. Indonesia adalah negara yang secara geografis berada di lingkaran cincin api dengan konsekuensi banyak terjadi bencana alam berupa gempa bumi dan erupsi gunung berapi. Disisi lain, keserakahan para pelaku bisnis yang mengeksplorasi alam secara berlebihan tanpa menghormati nilai-nilai kearifan lokal semakin menambah penderitaan masyarakat akibat bencana alam. Proses mitigasi yang saat ini dilakukan oleh Badan Penanggulangan

Bencana baik di daerah maupun pusat hanya mengedepankan kecanggihan teknologi saja dan belum mengoptimalkan peran dari nilai-nilai kearifan lokal. Maka dalam penanganan bencana juga perlu mengimplementasikan nilai-nilai kearifan lokal dengan kegiatan mendokumentasikan nilai-nilai kearifan lokal di seluruh wilayah Indonesia, mengelaborasi dan mengolaborasikan mitigasi bencana antara kecanggihan teknologi dan nilai-nilai kearifan lokal, melarang eksplorasi dan eksploitasi di tempat/wilayah yang dihormati masyarakat, dan mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal dalam membangun berbagai fasilitas di daerah rawan bencana serta menjaga alam agar alam pun menjaga kita.

17. **Rekomendasi.**

Berdasarkan uraian Simpulan di atas, maka terdapat beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Pemerintah melalui Kemendiknas memasukkan nilai-nilai kearifan lokal setempat dalam kurikulum pendidikan nasional sebagai wahana untuk menanamkan dan membangun karakter bangsa kepada para generasi muda Indonesia.
- b. Pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana baik tingkat pusat maupun daerah harus mengelaborasi dan mengolaborasikan nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat dengan kecanggihan teknologi dalam memitigasi bencana alam di Indonesia.
- c. Pemerintah melalui Kemendagri, Kemendiknas, Kemensos serta Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi harus memberikan perhatian yang lebih kepada lembaga adat ataupun praktisi kebudayaan yang benar-benar menjaga, memelihara dan menginternalisasikan nilai-nilai kearifan lokal di wilayah.
- d. Kepada seluruh Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Madya agar mengembangkan potensi nilai-nilai kearifan lokalnya dan membangun sinergi antar warga masyarakat serta memberikan masukan berharga kepada Pemerintah Pusat terkait pembangunan nasional berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Alhafizh Mahardika. 2017. Penanaman Karakter Bangsa Berbasis Kearifan Lokal Di Sekolah. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 7, No. 2, Nopember.
- Bevaola Kusumasari, PhD. 2014. Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal. Yogyakarta: Gava Media.
- Chappy Hakim. 2016. Menjaga Ibu Pertiwi dan Bapak Angkasa. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Erni Tisnawati dan Kurniawan Saefullah. 2009. Pengantar Manajemen. Jakarta: Kencana Perdana Media Goup.
- Elaine B. Johnson. 2011. Contextual Teaching and Learning. Menjadikan Kegiatan Belajar-Mengajar Mengasikkan dan Bermakna. Bandung: Kaifa Learning.
- F.X. Rahyono. 2015. Kearifan Budaya dalam Kata. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- George R. Terry. 2009. Prinsip-prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gadeng, A.N., Maryani, E Rochmat, D, 2018. The Value of Local Wisdom Smong in Tsunami Disaster Mitigation in Simeuleue Regency, Aceh Province. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. Koentjaraningrat. 1997. Koentjaraningrat dan Antropologi di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Koentjaraningrat. 1997. Koentjaraningrat dan Antropologi di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lemhannas RI. 2020. Geostrategi dan Ketahanan Nasional. Jakarta: Lemhannas RI.
- Muslich, K. 2013, Nilai-nilai universal Agama-agama di Indonesia menuju Indonesia Damai. Yogyakarta : Kaukaba Dipantara.
- Mustofa, Bisri dan Maharani, Elisa Vindi. 2008. Kamus Lengkap Sosiologi, Yogyakarta: Panji Pustaka.
- Nyoman Wijana. 2016. Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yogyakarta: Plantaxia.
- Pepih Nugraha. 2013. Ibu Pertiwi Memanggilmu Pulang. Jakarta: Benteng Pustaka.
- Pemerintah RI. 2010. Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025.

- Roger M. Keesing, Samuel Gunawan. 1992. Antropologi Budaya: Suatu Perspektif Kontemporer. Jakarta: Erlangga.
- Samsudin Sadili. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Pustaka Setia.
- Sriyana S.Sos.,M.Si. 2020. Perubahan Sosial Budaya. Sumedang: Literasi Nusantara.
- Stephen P. Robbins. 2003. Perilaku Organisasi. Jakarta: Index.
- Satgas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum. 2018. Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum 2019 – 2025. Pemrov Jabar.
- Suroto, S. 2016. Dinamika Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Berbasis Kearifan Lokal Dalam Upaya Memperkuat Karakter Unggul Generasi Muda. Pendidikan Kewarganegaraan, 6(2), 1040-1046.
- Ulfah Fajarini. 2014. Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter”. Sosio Didaktika: Vol. 1, No. 2 Des 2014.
- Yudi Latif. 2020. Pendidikan yang Berkebudayaan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Zamroni. 2011. Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural.. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- UU RI No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Internet :

- <https://lulusujian.com/pembangunan-nasional-masa-orde-lama-orde-baru-dan-era-reformasi>.

<https://historia.id/politik/articles/arti-ibu-pertiwi-hingga-pekik-merdeka-P3N8o/page/1>. Tim Historia. 15 Juli 2020.

<https://studylibid.com/doc/618780/pembangunan-hukum-berbasis-kearifan-lokal>

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-32-2009-perlindungan-pengelolaan-lingkungan-hidup>.

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1657/5/141801061_file%205.pdf.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_nasional_Indonesia.

<https://www.greenpeace.org/indonesia/publikasi/44219/karhutla-dalam-lima-tahun-terakhir/>. Diakses pada 22 Okt 2020.

<https://www.greenpeace.org/indonesia/publikasi/5605/>

<https://www.mongabay.co.id/2019/09/29/masyarakat-menolak-lokasi-pembangunan-waduk-lambo-kenapa/>

<https://rri.co.id/ende/nagekeo/935394/bupati-nagekeo-pastikan-pembangunan-waduk-lambo-tetap-berjalan>.

<https://kumparan.com/naniseptianie22/tantangan-indonesia-di-tengah-belt-and-road-initiative-bri-tiongkok-1unt5qMtwDZ>. Dipublikasikan pada tanggal 18 Desember 2020. Pkl: 12.53.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200910132248-4-185828/pembantaian-rohingya-myanmar-bunuh-semua-anak-orang-dewasa>. Dipublikasikan pada tanggal 10 September 2020. Pkl: 14.27.

<https://www.merdeka.com/dunia/fakta-fakta-uu-kewarganegaraan-india-diskriminasi-terhadap-muslim.html>. Dipublikasikan pada tanggal 19 Desember 2019. Pkl:06.11.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/11/04/23000091/menko-pmk-Ingatkan-generasi-muda-soal-bahaya-seks-bebas>. Pkl:23.00.

<https://studylibid.com/doc/618780/pembangunan-hukum-berbasis-kearifan-lokal>.
Hendra Wahanu Prabandani.

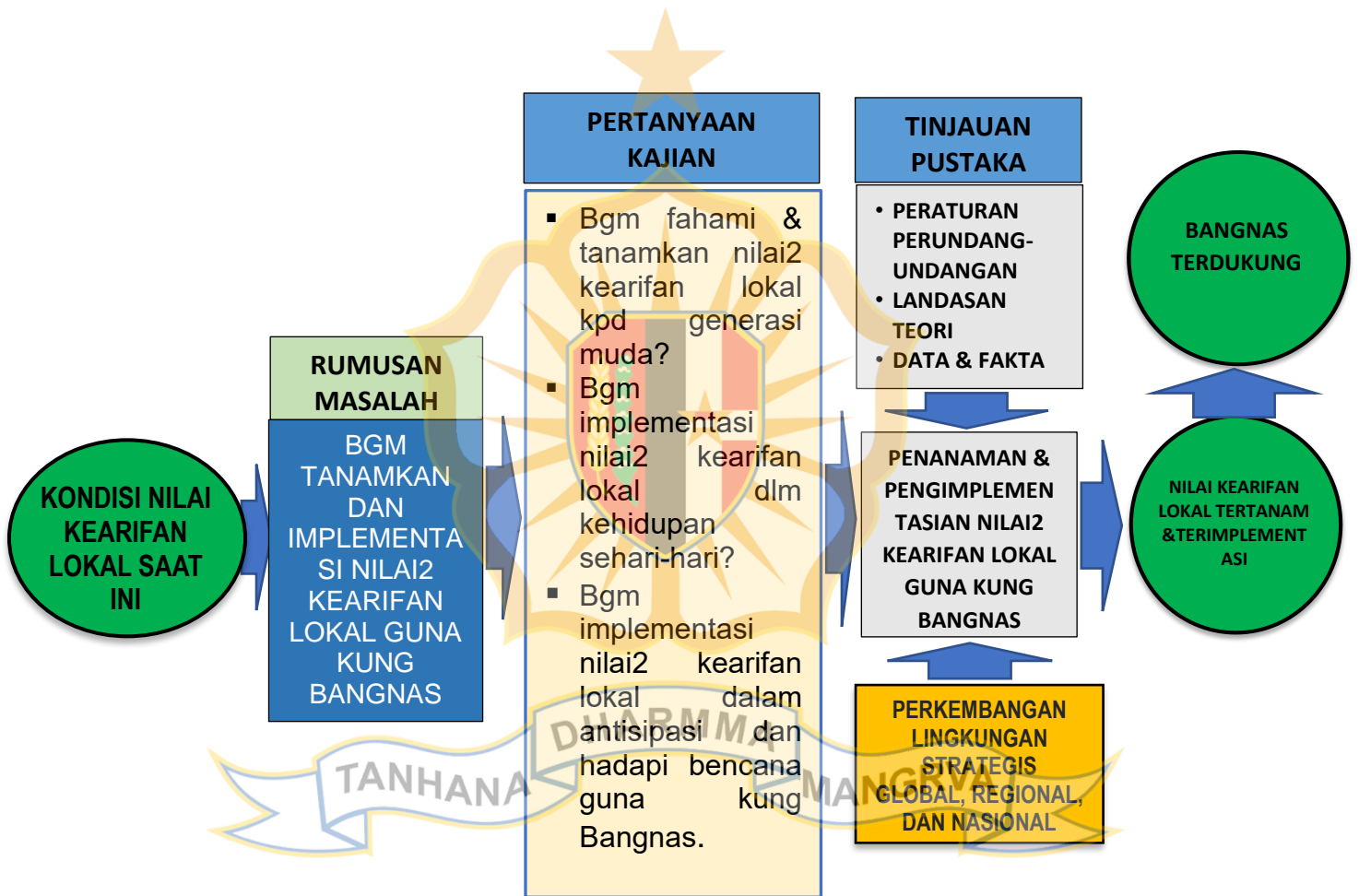
<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-32-2009-perlindungan-pengelolaan-lingkungan-hidup>.

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pranata-sosial/>. Parta Setiawan. 4 April 2021.

<https://lppm.undiksha.ac.id/senadimas2020/assets/ProsidingSenadimas2020/file/233.pdf>.

ALUR PIKIR

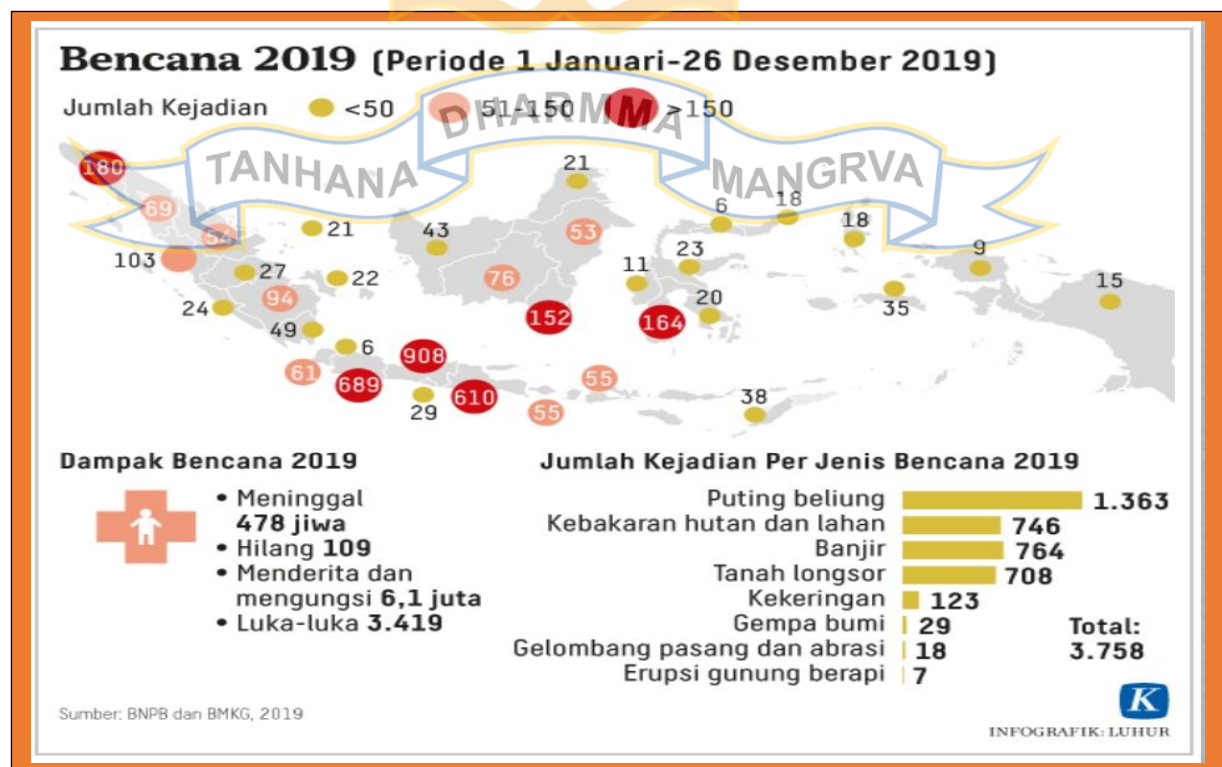
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL GUNA Mendukung PEMBANGUNAN NASIONAL



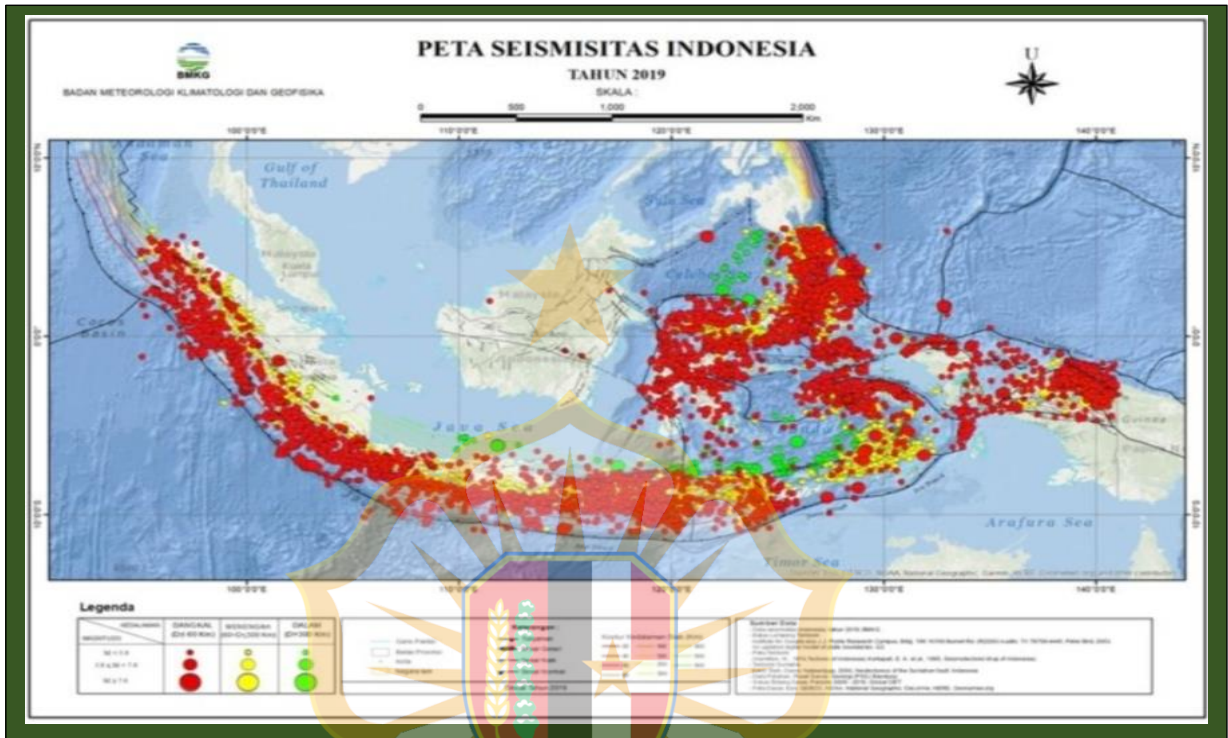
TABEL 1
SEBARAN GEMPA BUMI DI INDONESIA SEPANJANG TAHUN 2019



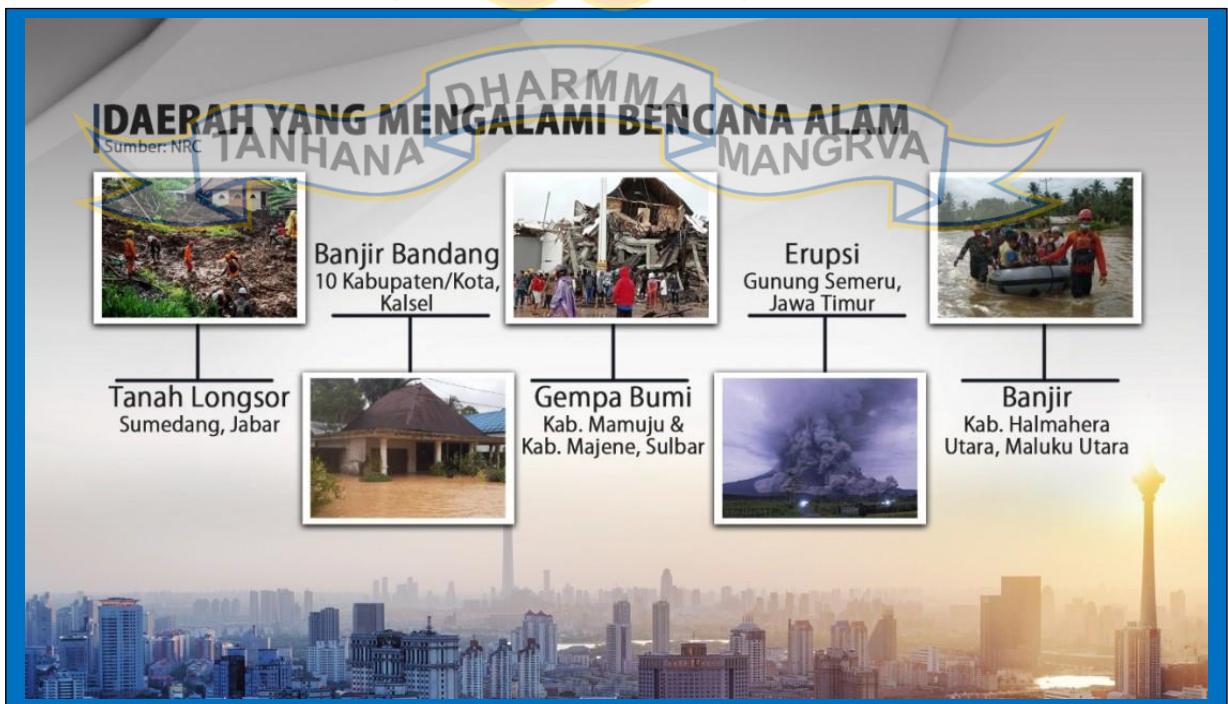
TABEL 2
FREKUENSI DAN DAMPAK BENCANA DI INDONESIA TAHUN 2019



GAMBAR 1
FREKUENSI GEMPA DI INDONESIA DALAM 10 TAHUN TERAKHIR



GAMBAR 2
RANGKAIAN BENCANA AWAL TAHUN 2021



RIWAYAT HIDUP



Kosasih, S.E, dilahirkan di Pandeglang, Banten pada tanggal 2 April 1971. Saat ini penulis menjabat sebagai Dosen Utama Seskoad. Penulis dikaruniai 2 orang putri, dari seorang istri yang bernama Asri Wiraningsih. Penulis lulus dari Akademi Militer pada tahun 1993, lulus Sussarcabif tahun 1994, lulus Pendidikan Kopassus tahun 1995. Kursus Counter Terrorism Korsel tahun 1996. Lulus Selapaif tahun 2001. Lulus Pendidikan Seskoad tahun 2007, lulus Pendidikan Strata Satu bidang Ekonomi tahun 2013, lulus Pendidikan Sesko TNI tahun 2018, dan pada tahun 2021 mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII Lemhannas RI.

Pengalaman Penugasan. Lulus dari Pendidikan Kopassus langsung berdinis sebagai Danton di Grup 1 Kopassus. Pada tahun 1995 Penulis berangkat penugasan ke Daerah Operasi Timor Timur. Sekembali dari Timor Timur tahun 1996 Penulis langsung menjabat sebagai Danki 112 Yon 11 Grup 1 Kopassus. Di tahun 1998 Penulis membawa Satgas Kipur Parako Kopassus berangkat tugas ke Papua hingga akhir tahun 1999. Pada tahun 2002 penulis berpindah tugas ke Paspampres sebagai Wadan Den Walpri Grup B Paspampres hingga akhir tahun 2006. Banyak pengalaman yang didapatkan selama berdinis di Paspampres. Selanjutnya pada awal tahun 2008, Penulis mendapatkan tugas ke Aceh sebagai Pabandyadik Dam IM Aceh dan tahun 2009 mendapat kepercayaan sebagai Danyonif 112 Dam IM. Tahun 2010 Penulis dipercaya sebagai Kasi Operasi Koren 12 Teuku Umar Meulaboh. Pada akhir tahun 2012 penulis kembali berdinis di Kopassus sebagai Kapuskodal dan Wair Kopassus hingga akhir tahun 2014. Tahun 2014 penulis berdinis di Akmil sebagai Kepala Departemen Mipatek hingga tahun 2016. Selanjutnya tahun 2016 s.d 2017 penulis berdinis di Ambon sebagai Kainfolakta dan Kabintaldam XVI/Pattimura. Selesai pendidikan Sesko TNI, pada tahun 2019 Penulis mendapat tugas kembali ke Kodam IM Aceh sebagai Staf ahli Pangdam IM hingga tahun 2020. Selanjutnya pada pertengahan tahun 2020 penulis bertugas di Seskoad sebagai Dosen Utama hingga sekarang.